

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS,  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN ZAKAT  
TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh :

**SAKINAH  
NIM. 160602044**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sakinah  
NIM : 160602044  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Sakinah

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Sakinah  
NIM. 160602044

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,

Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Sakinah  
NIM. 160602044

Telah disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 17 Desember 2021 M  
13 Jumadil Awal 1443H


Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,

Pembimbing I,

Sekretaris,


Pembimbing II,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

  
Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Penguji I

Penguji II

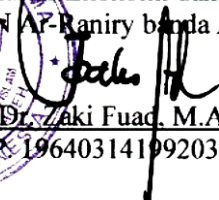
  
Dr. Syukriy Abdullah, SE., M.Si., Ak  
NIP. 197006301995121001

  
Hafiizh Maulana, SP., S.H.I., M.E  
NIDN. 2006019002



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT.PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sakinah  
NIM : 160602044  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : Sakinahkinah546@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir       KKU       Skripsi

Yang berjudul : **Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh**  
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 Desember 2021

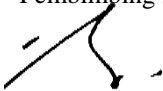
Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Sakinah

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

  
Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”-(QS. Ali Imran:139)*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”-(Q.S Al-Baqarah :286)*

### PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk ayahanda dan ibunda yang telah sangat berjasa dalam hidup saya yang tidak mungkin terbalaskan serta kakak dan abang yang telah memberikan dukungan dan doa terbaiknya. Serta dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik. Tidak lupa untuk sahabat yang selalu ada saat saya membutuhkan bantuan.*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan karunia-Nya, Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam sebagai tuntunan hidup yang sempurna bagi seluruh manusia. Kemudian Shalawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat Rasulullah Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”** ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku ketua dan sekretaris Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Winny Dian Safitri S.Si., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak



memberi waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.

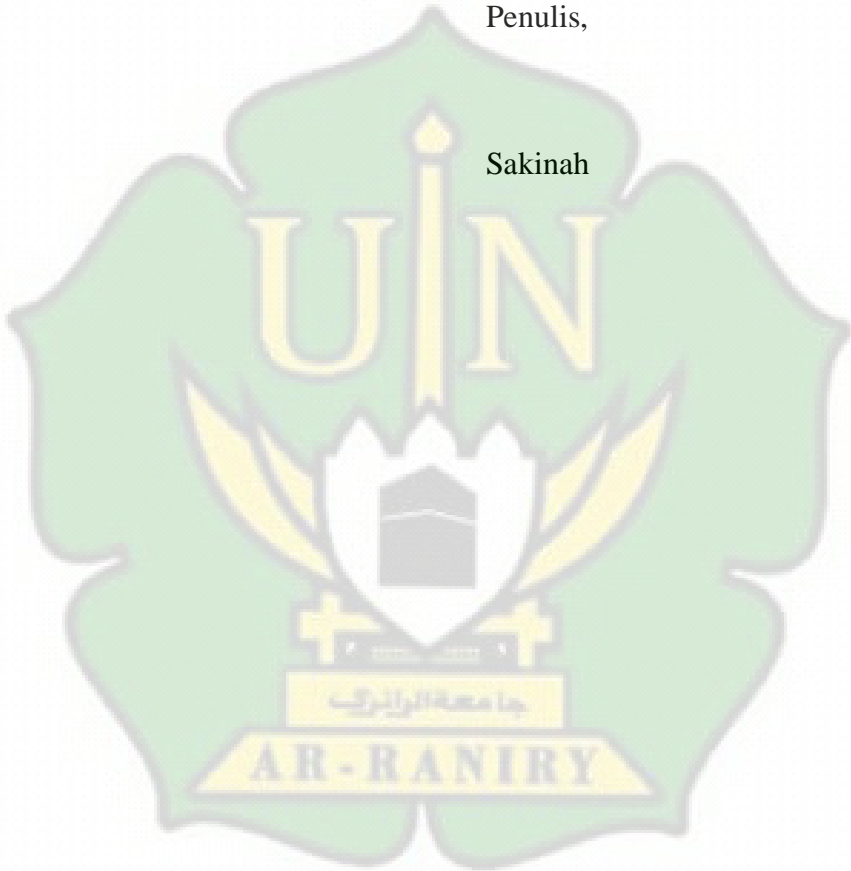
5. Dr.Syukriy Abdullah, SE.,M.Si.,Ak dan Hafiizh Maulana,SP., S.H.I.,M.E selaku penguji 1 dan penguji II.
6. Jalaluddin ST, MA selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan
7. Kedua orang tua saya, ayahanda Zulkarnain dan ibunda Lailawati yang selalu memberikan kasih sayang mendukung dan mendoakan saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Kakakku tersayang Mutia Lazita serta Abangku Muhammad Ikhsan dan Candra Pratama yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk meyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-Teman seperjuangan Program studi Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan Sahabat-sahabat terbaikku, azizah, yasriani, ulfa, arma, ama dan sahabat lainnya yang telah memberikan masukan, waktu serta selalu menyemangati saya dalam pembuatan skripsi ini
9. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 17 Desember 2021  
Penulis,

Sakinah



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*hauला* : هول

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

<i>qāla</i>	:	قَالَ
<i>ramā</i>	:	رَمَى
<i>qīla</i>	:	قِيلَ
<i>yaqūlu</i>	:	يَقُولُونَ

### 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatulatfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-MadīnatulMunawwarah*

*Ṭalḥah* : طَلْحَةَ

#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ;dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Sakinah  
NIM : 160602044  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pengaruh Dana otonomi Khusus  
Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat  
Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh  
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
Pembimbing II : Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Kemiskinan merupakan salah satu ukuran yang dapat mengukur baik maupun buruknya perekonomian suatu wilayah. Aceh merupakan provinsi pada peringkat ke-6 kemiskinan di Indonesia dan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana otonomi khusus, indeks pembangunan manusia dan zakat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif, adapun jenis data yang digunakan data sekunder dalam bentuk data panel. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Baitul Mal Aceh dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk menguji pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil penelitian diperoleh bahwa zakat dan dana otonomi khusus dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Artinya, jika zakat dan dana otonomi khusus menurun maka jumlah kemiskinan akan meningkat begitupun sebaliknya. Sedangkan IPM tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Zakat, Dana Otonomi Khusus, Indeks pembangunan Manusia.**

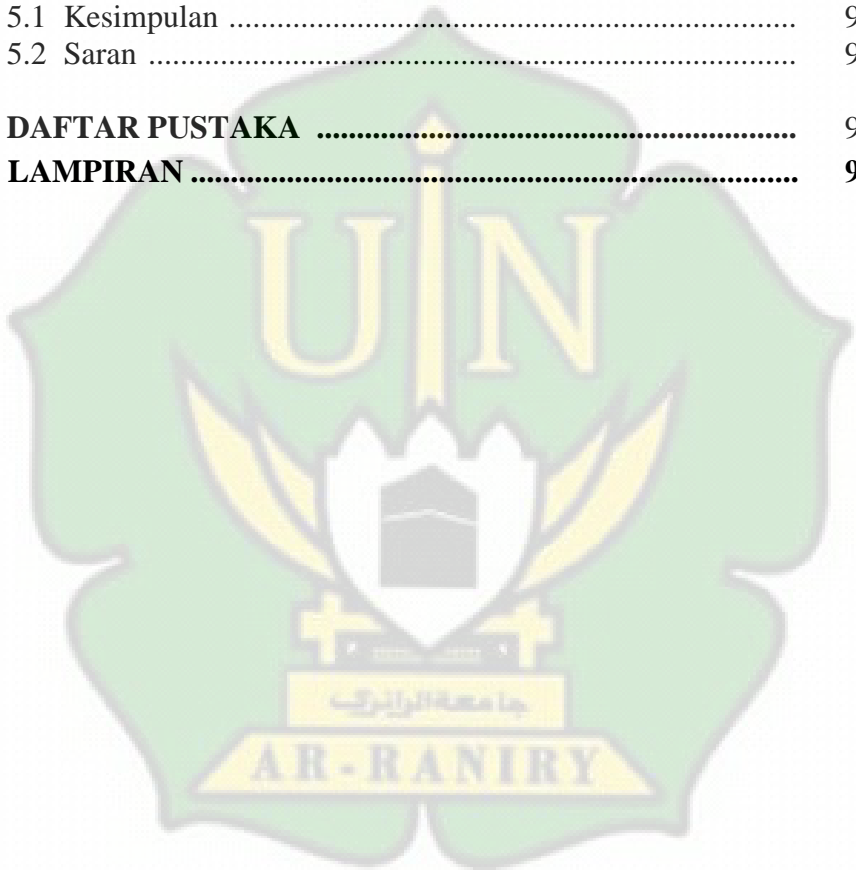
## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN SKRISPI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRISPI</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	15
2.1 Kemiskinan .....	15
2.1.1 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan .....	17
2.1.2 Ukuran Kemiskinan .....	19
2.1.3 Macam-macam Kemiskinan .....	20
2.2 Indeks Pembangunan Manusia .....	23
2.2.1 Komponen IPM .....	25
2.2.2 Pengukuran IPM .....	26
2.3 Zakat .....	29
2.3.1 Dasar hukum .....	30
2.3.2 Jenis Zakat .....	31
2.3.3 Orang yang Berhak Menerima Zakat .....	35



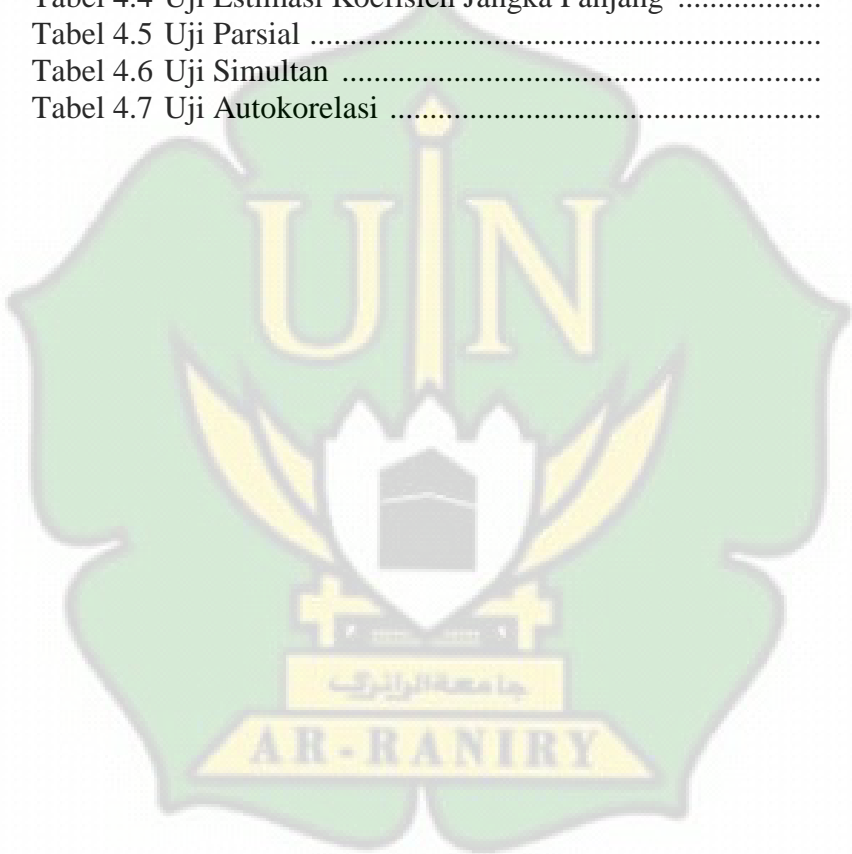
2.3.4 Konsep Dasar Pengelolaan Zakat .....	37
2.3.5 Zakat Sebagai PAD .....	40
2.3.6 Hikmah Zakat .....	44
2.3.7 Peran Zakat Dalam Perekonomian .....	45
2.4 Dana Otonomi Khusus .....	47
2.4.1 Pembagian Daerah-daerah Otonomi Khusus .....	48
2.4.2 Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus ....	48
2.4.3 Implementasi Penggunaan Dana .....	50
2.4.4 Mekanisme Penggunaan Dana Otonomi Khusus.....	52
2.5 Penelitian Terdahulu .....	54
2.6 Keterkaitan Antar Variabel .....	59
2.7 Kerangka Penelitian .....	61
2.8 HipotesisPenelitian .....	62
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	64
3.2 Jenis Data .....	64
3.3 Operasional Variabel .....	64
3.4 Metode Analisis Data .....	67
3.4.1 Uji Stasioneritas data .....	69
3.4.2 Uji Kointegrasi .....	70
3.5 Uji Statistik .....	71
3.6 Uji Autokorelasi .....	72
<b>BAB IVPEMBAHASAN DAN PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
4.1 Statistika Deskriptif .....	73
4.2 Stasioneritas .....	79
4.3 Uji Lag Optimal .....	80
4.4 Estimasi Autoregressive Distributed Lag .....	81
4.5 Uji Uji kointegrasi .....	83
4.5.1 Uji Estimasi Koefisien Jangka Panjang .....	84
4.6 Uji Statistik .....	86
4.6.1 Uji t Parsial .....	86
4.6.2 Uji F Simultan .....	87
4.6.3 Uji $R^2$ .....	88
4.7 Uji Autokorelasi .....	88
4.8 Pembahasan .....	89

4.8.1 Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Kemiskinan	89
4.8.2 Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan .....	91
4.8.3 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap .....	91
4.8.4 Kemiskinan .....	92
<b>BAB VPENUTUP</b> .....	<b>94</b>
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>98</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Uji Unit Root Test .....	79
Tabel 4.2 Hasil Autoregressive Distributed Lag .....	81
Tabel 4.3 Hasil Uji Kointegrasi .....	83
Tabel 4.4 Uji Estimasi Koefisien Jangka Panjang .....	84
Tabel 4.5 Uji Parsial .....	86
Tabel 4.6 Uji Simultan .....	87
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi .....	89



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2014-2020 .....	2
Gambar 1.2 IPM di Provinsi Aceh Tahun 2014-2020 .....	4
Gambar 1.3 Penerimaan Zakat di Provinsi Aceh Tahun 2014-2020 .....	6
Gambar 1.4 Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Tahun 2014-2020 .....	8
Gambar 2.1 Lingkaran kemiskinan .....	23
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian .....	62
Gambar 4.1 Rata-rata Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota .	74
Gambar 4.2 Rata-rata Jumlah Dana Otsus Menurut Kab/Kota .....	76
Gambar 4.3 Rata-rata Zakat Menurut Kab/Kota .....	77
Gambar 4.4 Rata-rata IPM Miskin Menurut Kab/Kota .....	78
Gambar 4.5 Panjang Lag Optimal .....	80

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014-2020 .....	98
Lampiran 2	Persentase IPM Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014-2020 .....	99
Lampiran 3	Dana Otsus Kab/Kota di Provinsi Aceh Menurut Pergub Tahun 2014-2020 .....	100
Lampiran 4	Penerimaan Zakat Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014-2020 .....	102
Lampiran 5	Uji Stasioner (Unir Root Test) .....	104
Lampiran 6	Model ARDL .....	108
Lampiran 7	Uji Lag Optimal .....	110
Lampiran 8	Uji Kointegrasi .....	111
Lampiran 9	Uji Autokorelasi .....	113



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

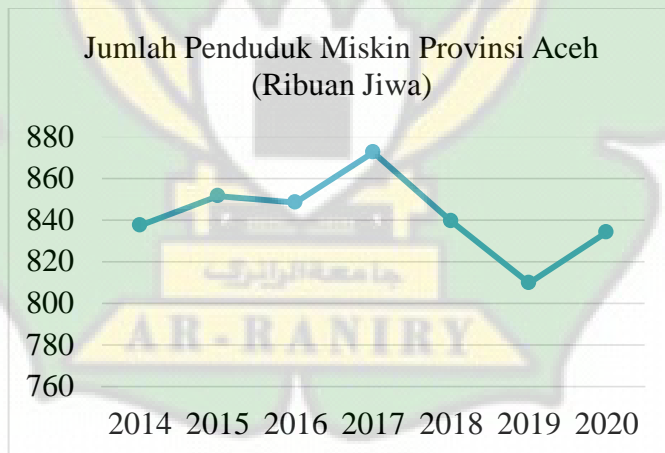
Kemiskinan merupakan masalah serius yang sering terjadi di negara berkembang, khususnya Indonesia. Negara berpenduduk padat di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kemiskinan dapat dijadikan sebagai ukuran baik buruknya perekonomian suatu negara (Munandar dkk., 2020). Kondisi Kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu tugas pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya penanggulangannya karena sangat menghambat perkembangan pembangunan di Indonesia juga mempengaruhi meningkatnya kemiskinan di masing-masing provinsi khususnya Provinsi Aceh.

Aceh merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Pada tingkat nasional Provinsi Aceh menempati peringkat ke-6 tertinggi setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh mencapai 819 ribu jiwa dan tertinggi di Sumatera. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Dengan menyerahkan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk

merencanakan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerahnya. Pemerintah daerah harus lebih peka pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan masih mengalami kendala di daerah sehingga perlu di evaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal mampu mengurangi kemiskinan di daerahnya.

Jumlah penduduk miskin di Aceh berfluktuasi selama 7 tahun terakhir dari 2014 hingga 2020, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2014-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (2021)

Berdasarkan grafik diatas jumlah penduduk miskin di Aceh tahun 2015 meningkat dari 851.58 ribu jiwa pada tahun 2014 menjadi 837.30 ribu jiwa. Grafik diatas memperlihatkan perubahan fluktuatif jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh selama periode



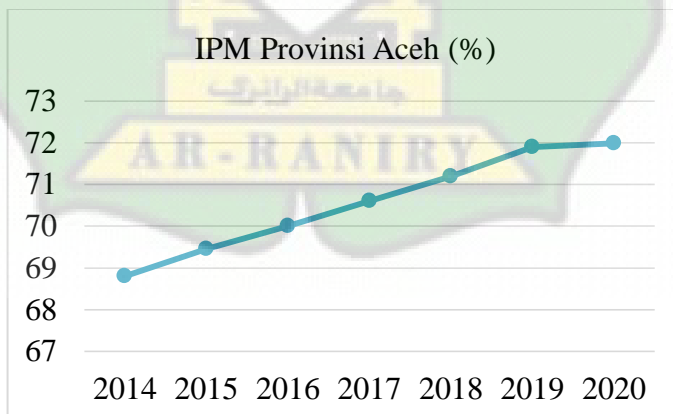
tahun 2014-2020. Salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan tingkat pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pengembangan sumber daya manusia dapat dicapai dengan meningkatkan akses konsumsi layanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi), strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia.

IPM merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM didasarkan pada pendekatan 3 dimensi dasar. Parameter ini meliputi umur panjang, kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang bermartabat. Ketiga dimensi ini sangat luas karena berhubungan dengan banyak faktor. Harapan hidup saat lahir digunakan untuk mengukur indikator kesehatan. Ini juga mengukur tingkat pengetahuan menggunakan kombinasi indikator literasi dan rata-rata lama belajar. Dalam mengukur dimensi kehidupan yang layak, daya beli masyarakat digunakan untuk berbagai kebutuhan dasar yang ditinjau dari segi pengeluaran rata-rata per kapita dengan pendekatan pendapatan yang mencerminkan perolehan pembangunan untuk kehidupan yang layak. (BPS, 2021)

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan

ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM yang rendah akan menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang lebih rendah, yang menyebabkan sejumlah besar orang miskin. Saat ini pembangunan manusia diukur dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI), yang merupakan indeks komprehensif untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. IPM sebagai indikator untuk mengukur pembangunan daerah harus berkorelasi positif dengan status kemiskinan daerah. Hal ini dikarenakan daerah tersebut diharapkan memiliki IPM yang tinggi sehingga diharapkan kualitas hidup masyarakatnya juga tinggi, atau nilai IPM yang tinggi dapat dikatakan menunjukkan rendahnya tingkat kemiskinan di masyarakat.

**Gambar 1.2**  
**Grafik IPM di Provinsi Aceh Tahun 2014-2020**

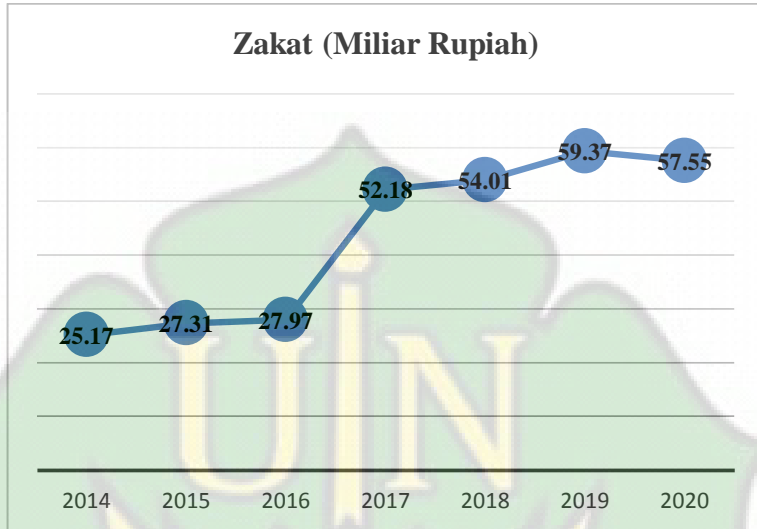


Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (2021)

Pada tahun 2014-2020 IPM di Provinsi Aceh terus meningkat, yaitu pada tahun 2014 rata-rata sebesar 68,81, dan pada 2018 rata-rata sebesar 71,19. Pemerintah telah berupaya dan berusaha dalam mengurangi kemiskinan, seperti dengan mengoptimalkan dana zakat. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi sering terkendala oleh keterbatasan modal yang dimiliki. Di era otonomi daerah diberikan kewenangan dan kebebasan untuk mengelola potensi daerah salah satunya sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah Zakat. Zakat merupakan ibadah yang dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberikan keberkahan pada harta yang dimiliki.. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai sosial disamping membawa pesan spiritual (Lapopo, 2017).

Pengelolaan zakat Aceh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, zakat ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah sejak dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pasal 180 menyebutkan bahwa zakat menjadi salah satu sumber PAD Aceh dan kabupaten/kota. Dengan zakat menjadi salah satu penerimaan daerah sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 1.3**  
**Penerimaan Zakat di Provinsi Aceh tahun 2014-2020**



Sumber: Baitul Mal Aceh (2021)

Gambar 1.3 memperlihatkan perubahan fluktuatif penerimaan zakat di Provinsi Aceh selama periode tahun 2014-2020. Gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 zakat Aceh meningkat sebesar Rp 25,176 miliar dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan drastis sebesar Rp 53,927 miliar. Dari realisasi penerimaan Zakat yang terus meningkat setiap tahunnya diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh. Dengan memanfaatkan zakat diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan produksi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan penduduk (Munandar dkk., 2020).

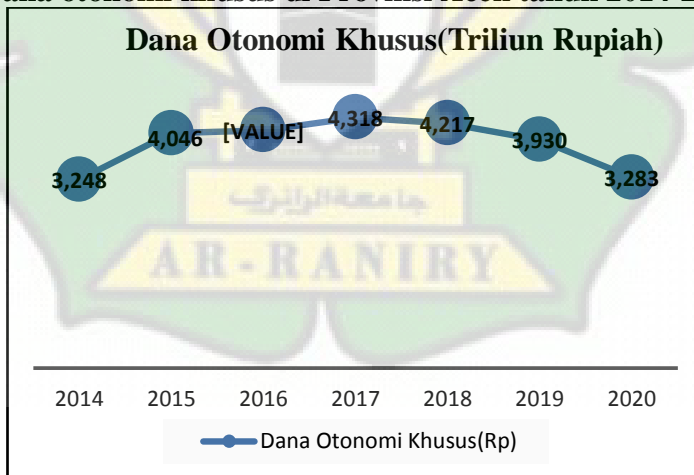
Selain dengan meningkatkan IPM dan mengoptimalkan zakat, sumber penerimaan keuangan daerah juga berasal dari dana perimbangan dalam rangka otonomi khusus untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, khususnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desentralisasi asimetris membuka peluang dengan adanya daerah khusus dan istimewa. Daerah yang bersifat khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan daerah yang bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang menikmati otonomi khusus berdasarkan UU No. November 2006 terkait dengan Pemerintah Aceh. Pelaksanaan otonomi khusus juga ditandai dengan pemberian sumber keuangan kepada pemerintah Aceh dalam bentuk pendapatan dan dana daerah, termasuk melalui penyediaan dana otonomi khusus. Dana Khusus Otonomi Aceh adalah pendapatan pemerintah Aceh untuk mendanai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pendanaan untuk pendidikan, pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan. Selain itu, dana Otsus juga dialokasikan untuk mendanai program-program pembangunan dalam rangka pelaksanaan hak istimewa Aceh. Penerimaan Dana Otsus Aceh berlangsung dari tahun 2008 sampai 2028 selama 20

tahun berdasarkan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) (Taurina dkk., 2019).

Era otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola kekayaan dan sumber daya daerahnya untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. Otonomi khusus Aceh diyakini memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan lebih cepat jika didukung oleh tata pemerintahan yang baik. Karena pemerintah daerah lebih dekat dengan warga daripada pemerintah pusat dalam otonomi khusus Aceh, diharapkan pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang akurat dan menyelesaikan masalah lebih cepat dengan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya (Alfiady dkk, 2019).

**Gambar 1.4**  
**Dana otonomi khusus di Provinsi Aceh tahun 2014-2020.**



Sumber: Bappeda (2021)

Pada tahun 2014 Aceh menerima dana otsus sebesar Rp 3,24 Triliun yang terus meningkat setiap tahun seiring dengan

berkembangnya DAU negara. Dana otonomi khusus yang dihasilkan merupakan jumlah yang sangat besar yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk Aceh dalam rangka menurunkan kemiskinan. Namun dana otonomi khusus belum berjalan efektif dan tidak dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan Aceh sebagai penerima dana otonomi khusus berada pada peringkat ke-6 sebagai provinsi termiskin.

Otonomi daerah atau yang disebut dengan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pelayanan publik yang tepat dan layak untuk membantu masyarakat miskin di wilayah/kota Provinsi Aceh. desentralisasi bertujuan untuk mengubah struktur politik, memperbaiki tata pemerintahan, atau mengubah sikap pemerintah terhadap masyarakat miskin, maka diharapkan dapat mengarah pada pengurangan kemiskinan. Desentralisasi fiskal akan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan jika diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Berikut adalah temuan peneliti sebelumnya tentang keterkaitan antara IPM dengan kemiskinan hingga saat ini terdapat temuan empiris bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian Prasetyoningrum (2018) tentang analisis pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Indonesia diperoleh bahwa IPM berpengaruh secara langsung negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai IPM



menurunkan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan IPM menunjukkan bahwa IPM mampu meningkatkan produktivitas manusia, sehingga pendapatan akan meningkat dan kebutuhan hidup yang berkualitas dapat terpenuhi.

Selanjutnya hasil penelitian tentang zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, seperti penelitian Munandar dkk. (2020) tentang keterkaitan zakat dengan kemiskinan menyimpulkan bahwa penyaluran dana ZIS mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Selanjutnya hasil penelitian tentang keterkaitan antara dana otonomi khusus dengan kemiskinan hingga saat ini terdapat temuan empiris yang berbeda. Hasil penelitian (Muliadi & Amri, 2019) menemukan dana otonomi khusus memiliki hubungan berpengaruh positif dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Aceh.

Hal yang penting untuk diperhatikan ialah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa memberikan pengaruh serta dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan setiap tahunnya. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah maka perlu dikeluarkannya kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk pembangunan perekonomian secara menyeluruh. Dimana kebijakan ini mempengaruhi Pengelolaan anggaran negara/daerah yaitu kebijakan fiskal. Maka pendapatan yang diterima dalam perekonomian modern berupa penerimaan pajak dan untuk beberapa daerah ada dana otonomi khusus. Sedangkan dalam Islam jenis penerimaan yang telah ada salah satunya adalah penerimaan zakat. Kebijakan

dari Dana otonomi khusus dan IPM memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan begitu juga dengan adanya penerimaan zakat memiliki dampak terhadap kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Dana otonomi Khusus Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat Terhadap Kemiskinan diProvinsi Aceh.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Otonomi khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis Dana Otonomi Khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

2. Untuk menganalisis IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Untuk menganalisis pengaruh zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

1. Manfaat akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu di bidang akademik dalam hal pengaruh dana otonomi khusus, IPM dan zakat terhadap kemiskinan dengan serta menambah informasi dan referensi bacaan serta bahan masukan yang berguna untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan dana otonomi khusus, IPM dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

- b. Bagi pemerintah Aceh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengelola zakat dan

dana otonomi, serta meningkatkan IPM untuk mengurangi kemiskinan.

- c. Bagi masyarakat, Sebagai pengetahuan bahwa melalui zakat, dana otonomi khusus, dan IPM dapat mengatasi kemiskinan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab yang bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran penulis. Kerangka penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yang akan diuraikan pada paragraf dibawah ini.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang pengantar keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori mengurai tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, membahas hasil penelitian terdahulu yang serupa serta memuat kerangka penelitian dan hipotesis penelitian

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

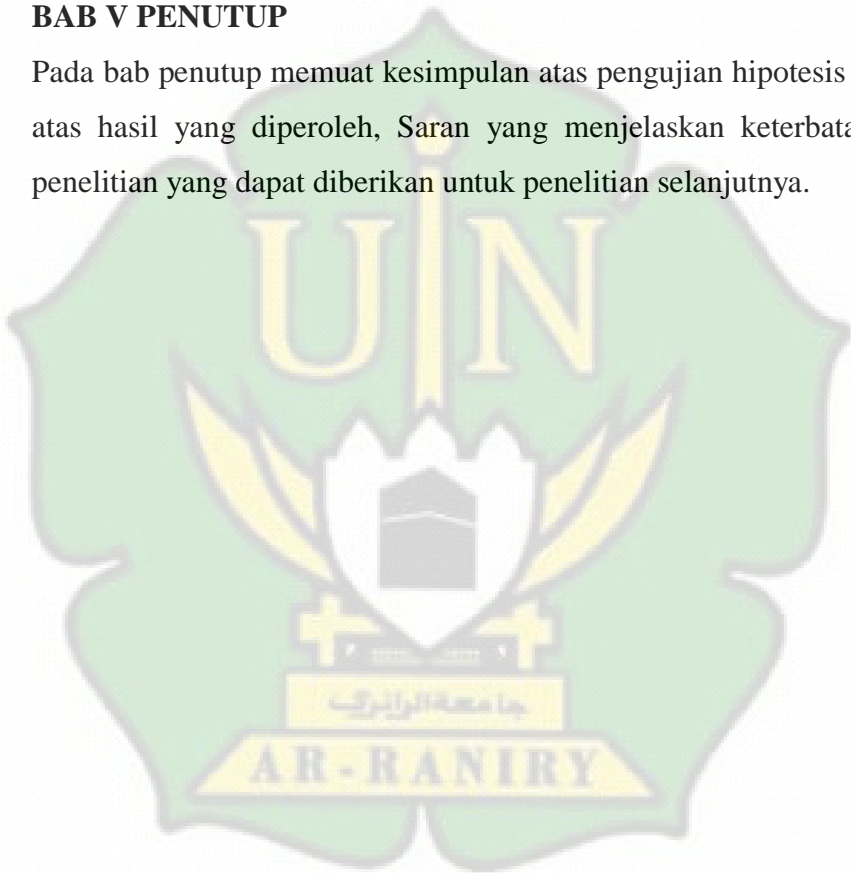
Pada bab metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, operasional variabel dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan memuat deskripsi penelitian, hasil analisis, hasil uji hipotesis serta pembahasan tentang hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup memuat kesimpulan atas pengujian hipotesis dan atas hasil yang diperoleh, Saran yang menjelaskan keterbatasan penelitian yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut BPS kemiskinan adalah ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu ukuran atau standar yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karna adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Menurut Najmi (2019) kemiskinan merupakan kurang dalam hal kesejahteraan yang multidimensi. Salah satunya memiliki pendapatan rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar serta layanan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah, yaitu derajat kekurangan materi sebagian orang dibandingkan dengan taraf hidup umum masyarakat yang bersangkutan. Standar hidup yang rendah ini secara langsung mempengaruhi tingkat kesehatan, kehidupan moral dan harga diri mereka yang tergolong miskin

(Susilowati dkk., 2017). Sedangkan menurut Aryani dkk (2019) kemiskinan adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup nyaman ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis dan dimensi spiritual.

Menurut Zahra dkk. (2019) Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Tingkat kemiskinan yang rendah menandakan program pembangunan telah berhasil dan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kemiskinan yang digunakan untuk menghitung kemiskinan oleh badan pusat statistik antara lain:

1. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar

Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang masih termasuk dalam kategori kebutuhan utama, diantaranya lain rumah, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

2. Pengeluaran perkapita

Pengeluaran per kapita per bulan untuk kebutuhan pangan dan non pangan. Untuk kebutuhan pangan, pengeluaran minimal untuk kebutuhan pangan setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari.



### **2.1.1 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan**

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Menurut Aziz dkk., (2016) faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain adalah :

1. Pendidikan

Tingginya pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja dan dengan pendidikan dapat mengubah pola pikir menjadi lebih rasional dan logis. Dengan berpikir secara rasional diharapkan dapat menjadi dasar untuk memandang dan menyelesaikan permasalahan. Namun mahalnya biaya pendidikan tidak dapat dijangkau oleh semua masyarakat, meski pemerintah telah memberlakukan kebijakan pendidikan gratis untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), faktor biaya lain seperti buku pelajaran masih sangat tinggi. Seragam sekolah dan keperluan lainnya.

2. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu , tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pada umumnya masyarakat miskin dihadapi dengan masalah terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta

lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

3. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah unruk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kebijakan fiskal dikenal beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Pemerintah Indonesia telah membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua yaitu: Pertama, Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari- hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi dibedakan menjadi dua : subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran angsuran dan bunga utang negara. Kedua, Pengeluaran Pembangunan ialah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat dapat menambah modal masyarakat. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai program pembangunan sehingga anggaran yang diajukan selalu menyesuaikan dana yang didapatkan oleh pemerintah.

Dana tersebut kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah.

### **2.1.2 Ukuran Kemiskinan**

Dari segi kelompok sasaran, ada beberapa jenis kemiskinan. Pengelompokan kemiskinan ini memastikan bahwa setiap tujuan program tepat sasaran. Jacobus dkk., (2018) Membagi kemiskinan menjadi 4 tipe yaitu:

1. Kemiskinan absolut yaitu terjadi saat orang atau kelompok masyarakat memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai standar kesejahteraan. Kemiskinan absolut merupakan bentuk kemiskinan yang paling banyak digunakan sebagai konsep untuk menentukan ataupun menjelaskan kriteria seseorang disebut miskin.
2. Kemiskinan relative yaitu situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas. Kondisi dimana pendapatan berada diatas garis kemiskinan, namun lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan struktural yaitu Kemiskinan yang disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan sehingga menyebabkan ketimpangan

4. Kemiskinan kultural adalah suatu bentuk kemiskinan yang timbul dari sikap dan kebiasaan individu atau masyarakat, biasanya akibat budaya atau praktik yang relatif enggan untuk meningkatkan taraf hidup melalui prosedur modern. Kebiasaan tersebut bisa berupa malas, boros, kurang kreatif, dan relatif tergantung pada orang lain.

### **2.1.3 Macam-macam Kemiskinan**

Jacobus dkk. (2018), menjelaskan kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan.

1. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan ini terbentuk disebabkan karena adanya kelangkaan sumber daya alam dan kurangnya prasarana umum, serta tanah yang tidak subur.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang disebabkan oleh modernisasi atau sistem pembangunan, di mana orang tidak memiliki kesempatan yang sama atas sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Adapun Menurut Niswati (2014) teori-teori kemiskinan sebagai berikut:

1. Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Dalam teorinya, Keynes mengandalkan analisis statistik dan membuat asumsi tentang konsumsi berdasarkan refleksi dan observasi. Pertama, Keynes mengusulkan bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal dari jumlah yang dikonsumsi dari setiap pendapatan tambahan adalah antara 0 dan 1. Kedua, Keynes berpendapat bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata, menurun ketika pendapatan meningkat. Karena Keynes menganggap menabung sebagai kemewahan, dia mengharapkan orang kaya menabung lebih banyak daripada orang miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan penting dari konsumsi, tetapi tingkat bunga tidak. Keynes mengatakan bahwa pengaruh suku bunga terhadap konsumsi hanyalah sebuah teori.

## 2. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (Milton Friedman)

Pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan dimasa depan. Pendapatan sementara (pendapatan transitoris) adalah bagian pendapatan yang tidak diharapkan terus bertahan. Nilai pendapatan ini kadang positif dan kadang negatif.

### 3. Teori pendapatan

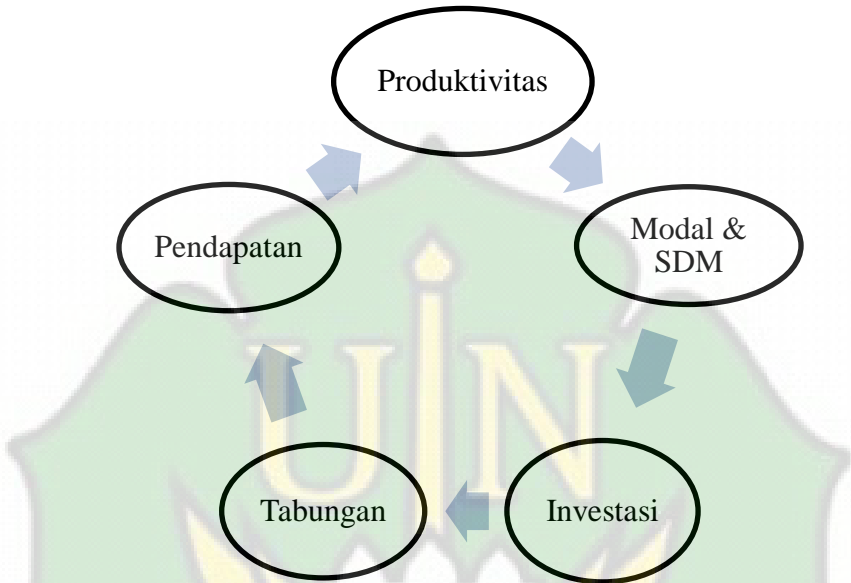
Pendapatan tidak seluruhnya akan dikeluarkan, tetapi ada sebagian yang ditabung (saving). Selanjutnya tentang pengeluaran, ada pengeluaran yang ditujukan untuk barang yang langsung dapat memuaskan kebutuhan (pengeluaran konsumsi), dan ada pengeluaran pengeluaran yang ditujukan untuk membeli barang-barang modal (yaitu pengeluaran investasi), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha. Oleh karena itu pendapata dapat dirumuskan dengan dua cara yaitu bila  $Y$ =pendapatan,  $C$ =konsumsi, dan  $I$ =investasi, maka:

$$Y = C + S \qquad Y = C + I \qquad (1)$$

### 4. Teori Lingkaran Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*civious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

**Gambar 2.1**  
**Lingkaran kemiskinan**



## **2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan pertama kali di dipublikasi melalui *Human Development Report (HDR)* tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam berbagai aspek. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP



menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu:

1. Produktivitas, masyarakat harus sepenuhnya terlibat dalam proses peningkatan produktivitas dan menghasilkan pendapatan dan pekerjaan yang dibayar.
2. Ekuitas, masyarakat harus memiliki akses terhadap kesempatan yang sama.
3. Kestinambungan, akses terhadap peluang harus dipastikan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang.
4. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus terlibat penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (Setiawan & Hakim, 2013).

IPM merupakan indikator pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan indikator kualitas hidup dan dibangun atas dasar pendekatan tiga dimensi dasar. Parameter ini termasuk umur panjang dan kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang bermartabat. Ketiga dimensi ini sangat luas karena berhubungan dengan banyak faktor. Harapan hidup saat lahir digunakan untuk mengukur indikator kesehatan. Ini juga mengukur ukuran pengetahuan dengan menggabungkan literasi dan rata-rata lama belajar. Dalam mengukur parameter kualitas hidup, indikator daya



beli masyarakat digunakan untuk berbagai kebutuhan dasar. Ditinjau dari pengeluaran rata-rata per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mencerminkan pencapaian pembangunan untuk hidup yang layak (BPS, 2021). Dengan kata lain semakin tinggi atau baik setiap komponen yang menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

IPM adalah indikator gabungan yang digunakan untuk mengukur kinerja rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup saat lahir dan kematian bayi, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lamasekolah, dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf dan standar hidup berdasarkan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan paritas daya beli (Asnidar, 2018).

Pengembangan sumber daya manusia digunakan untuk mengembangkan masyarakat agar dapat mengembangkan kapasitasnya sendiri. Pembangunan manusia harus ikut serta dalam merangsang proses-proses yang mampu meningkatkan kualitas diri sumber daya manusia. Dasar dari indeks pembangunan manusia ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. IPM dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPM} = (\text{index}X_1 + \text{index}X_2 + \text{index}X_3) / 3 \quad (2)$$

Keterangan:

$X_1$  = lama hidup,

$X_2$  = tingkat pendidikan,

$X_3$  = tingkat kehidupan yang layak.

### **2.2.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia(IPM)**

a. Angka harapan hidup

Angka harapan hidup merupakan perkiraan jumlah tahun rata-rata seseorang dapat hidup dalam seumur hidup.

b. Angka melek huruf

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk berusia di atas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan orang berusia 15 tahun ke atas untuk menerima pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS menghitung standar hidup yang layak dengan menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan rumus Atkinson.

### **2.2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan presentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli (Harya, 2020).

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Indeks pembangunan manusia merupakan Indeks Dasar yang tersusun dari dimensi-dimensi

- a. Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

(3)

- b. Pengetahuan, yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (4)$$

- c. Standar hidup yang layak, dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})} \quad (5)$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100 \quad (6)$$

Skor Indeks Pembangunan Manusia ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin tinggi nilai IPM dan semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu negara. Demikian pula sebaliknya. Indeks Pembangunan Manusia ini oleh UNDP dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi :  $IPM > 80$
- Tinggi :  $IPM \text{ antara } 70 < IPM < 80$
- Sedang :  $IPM \text{ antara } 60 < IPM < 70$
- Rendah :  $IPM < 60$

### **2.3 Zakat**

Zakat yang merupakan Rukun Islam ke-3 setelah syahadat dan shalat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yang berarti Tumbuh, Berkembang, Mensucikan, atau Membersihkan(Nadhari, 2013).Sedangkan secara istilah Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang muslim yang mampu (muzakki) untuk diberikan kepada muslim lainnya yang tidak mampu (mustahik).

Romdhoni (2017) menjelaskan zakat adalah suatu barang yang wajib diberikan oleh seorang muslim kepada yang berhak menerimanya. Selain perorangan, zakat juga diwajibkan untuk badan/lembaga/institusi. Zakat adalah sistem penting ideologi Islam oleh karena itu ia berperan aktif dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Muslim. zakat merupakan sumber penting stabilitas masyarakat. Sistem Zakat memastikan distribusi kekayaan yang tepat dan berdampak luas pada seluruh pengaturan dari masyarakat. Jika Zakat dibentuk sebagai lembaga, maka akan tercipta secara kolektif skema jaminan sosial untuk saling membantu/simpaty dan sumber daya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan social (Abdullah & Suhaib, 2011). Menurut Wahid dkk. ( 2009) Zakat adalah salah satu rukun islam yang berperan penting dalam kehidupan umat islam. Zakat merupakan salah satu ibadah yang dapat membersihkan jiwa manusia serta membersihkan hartanya dan membantu golongan asnaf karena dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain.

### 2.3.1 Dasar Hukum

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, maka setiap muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai nishab dan haulnya wajib mengeluarkan zakat.

Dasar hukum diwajibkan membayar zakat terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-baqarah [2]: 43)*

Perintah melaksanakan zakat tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

*Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah [9]:103).*

Pada kata ambillah dalam kaidah fiqih berarti bersifat keharusan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat, untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya.

### 2.3.2 Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan dalam bentuk beras dan zakat maal atau zakat harta yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki berdasarkan persyaratan tertentu.

1. Zakat fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang ditunaikan oleh seluruh umat islam yang mampu pada bulan ramadhan menjelang shalat Idul Fitri. Zakat ini disebut zakat fitrah karena berkaitan dengan diri seseorang (al-Fitrah). Adapun jumlah yang harus ditunaikan dalam zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum, disesuaikan dengan jenis makanan pokok di daerah tersebut.

2. Zakat mal(harta)

Maal berasal dari kata bahasa Arab artinya harta atau kekayaan (al-amwal, jamak dari kata maal) adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Zakat maal adalah zakat yang harus ditunaikan atas harta yang dimiliki, dimana harta tersebut secara zat dan cara memperolehnya tidak bertentangan dengan syariat islam. Harta yang harus di bayar zakat adalah sebagai berikut:

- a. Emas dan Perak

Zakat emas dan perak yang dimaksud di sini tidak hanya permata, tetapi juga dinar dan dirham. Ada perbedaan pendapat diantara kalangan ulama tentang emas dan perak yang digunakan, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa jika sudah mencapai



nishab dan haulnya wajib membayar zakat atas perhiasan yang digunakan, disimpan, atau dipinjamkan. Adapun nishab dari emas yaitu 85 gram atau setara dengan 20 misqal/20 dinar. Jumlah zakat emas yang harus dikeluarkan apabila telah mencapai nishab yaitu 2,5 % atau 2,125 gr emas. Sedangkan nishab perak yaitu 200 dirham yang setara dengan 595 gr perak, zakat yang harus dikeluarkan untuk perak yaitu 2,5% atau 14,875 gr perak.

b. Komoditas Dagang

Komoditas dagang merupakan barang yang disediakan dengan tujuan jual beli dalam transaksi perdagangan, barang-barang yang termasuk komoditas dagang yaitu real estate, makanan, perabotan, dan lainnya. Adapun nishabnya sebagian ulama berpendapat bahwa nishab dari zakat komoditas dagang sama dengan nishab zakat emas dan perak yaitu senilai 85 gr emas. Kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5 % dari harta perdagangan.

c. Binatang Ternak

Nisab unta adalah 5 ekor. Maknanya, jika sudah memiliki unta sebanyak 5 ekor, maka wajib membayar zakat. Seiring bertambahnya jumlah unta yang dimilikinya, demikian pula zakatnya. Pada setiap kelipatan 30 ekor sapi dikenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun dan setiap kelipatan 40 dikenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun. Kambing atau Domba Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor.



Maknanya, jika sudah memiliki 40 ekor kambing atau domba, wajib membayar zakat atasnya.

d. Pertanian (Buah- buahan dan Biji-bijian)

Para ulama berpendapat bahwa pertanian yang wajib mengeluarkan zakat yaitu biji-biji yang menjadi makanan pokok diantaranya jagung, gandum, beras dan lainnya, dan jenis buah yang wajib mengeluarkan zakat hanya kurma dan anggur. Sedangkan buah jenis lain tidak wajib mengeluarkan zakat. Nishab zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 300 sha' / 653 kg.

Kadar zakat dari hasil pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu: jika hasil pertanian diairi dengan air hujan, mata air, dan sungai, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 10 % atau 65,2kg dari 652 kg. Sedangkan hasil pertanian yang diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar yang wajib dikeluarkan yaitu 5% atau 32,6 kg dari 652 kg. Adapun haul zakat pertanian tidak ditentukan atau dapat dibayarkan ketika panen.

e. Rikaz (Harta Terpendam) dan Mada'in (Barang Tambang)

Rikaz merupakan harta yang ditemukan atau dikubur di dalam tanah berupa kekayaan, permata dan uang orang jahil. Sedangkan Mada'in adalah barang-barang yang ditambang dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis. Di dalam sebuah hadist menunjukkan bahwa rikaz itu wajib dizakati secara mutlak, artinya baik rikaz itu dalam jumlah besar atau kecil tetap harus dizakati. Sedangkan nishab dari mada'in tidak ada dalil yang

menunjukkan secara pasti. Adapun kadar zakat rikaz adalah 20% dari rikaz tersebut baik banyak atau sedikit. Sedangkan kadar zakat mada'in menurut para ulama adalah mengqiyaskan barang tambang dengan emas dan perak yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) karena barang tambang sekarang seperti barang-barang berharga dan bernilai ekonomis. zakat rikaz dan mada'in dikeluarkan ketika sudah mendapatkan barang tersebut (Riwayati et al., 2018).

- f. Penghasilan tetap/insidental (gaji, honor, saham, obligasi, dll)

Zakat penghasilan bersih untuk pegawai dan profesi tertentu bisa diambil dalam masa 1 tahun jika pendapatan tersebut sudah mencapai nishabnya. Tidak wajib dizakati bila pendapatan bersih tidak mencapai nishab setelah dikurangi biaya hidup karena zakat pendapatan hanya diambil dari pendapatan bersih. Zakat profesi bisa disamakan dengan zakat pertanian dan zakat emas dan perak. (Ismayana, 2016).

Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat maal yaitu sebagai berikut:

- a. Milik pribadi sepenuhnya
- b. Harta halal dan diperoleh secara halal
- c. Harta yang dapat berkembang, produktif atau dapat dimanfaatkan
- d. Sudah mencapai nishab
- e. Bebas dari hutang

- f. Sudah mencapai haul Atau dapat ditunaikan saat panen.

### 2.3.3 Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah:60

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (Q.S At-Taubah:60).

Ayat diatas menjelaskan menunjukkan bahwa penerima zakat meliputi delapan golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Orang fakir: Mereka yang tidak memiliki kekayaan dan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya, seperti tidak mampu memberi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
2. Orang miskin: Orang yang memiliki harta dan pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga.
3. Amil zakat: Mereka yang bertugas mengurus zakat yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak (mustahik zakat).

4. Mu'allaf: Orang yang memantapkan hatinya pada agama islam, atau orang yang baru memeluk agama islam.
5. Budak: Seseorang yang berada dalam kekuasaan orang lain atau majikannya.
6. Orang yang berhutang: Mereka yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya.
7. Fi Sabilillah: mereka yang berjuang secara sukarela di jalan Allah. Mereka diberi bagian dari zakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata dan kendaraan, serta menghidupi diri dan keluarganya.
8. Ibn Sabil: Seorang musafir tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negara lain. Mereka diberikan zakat agar bisa kembali ke negaranya(Dimyati, 2018).

#### 2.3.4 Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam alquran surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
 لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".(QS. At-Taubah [9]: 103)*

Ayat ini dapat dipahami bahwa kata khudz (berbentuk fi'il amar) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa fiil amar menunjukkan suatu perintah wajib al-ashlu fi al-amr lilwujub. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib (Hasan, 2011:8). Mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua kegiatan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan tersebut harus direncanakan, diatur, bahkan dikendalikan, dan dinilai pencapaiannya. Dalam konteks itu, pengelolaan untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaannya berjalan dengan lancar dan sistematis, dengan tujuan yang tepat.

Para ulama memiliki pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut: Pertama, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negara, dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya. Kedua, para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin.

Iman alRazi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan (Atabik, 2015). Saat mengelola zakat, penting untuk mengetahui kemana zakat didistribusikan dan digunakan. Badan amil zakat harus memiliki dokumen dan data atau pembukuan rinci mengenai jumlah zakat yang diterima, pembayar, tempat penggunaan dan lainnya.

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai zakat diterapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat (harta yang wajib dizakatkan) dan pendayagunaan (pendistribusian) zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua bentuk organisasi memiliki kesamaan tujuan, yaitu bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban

ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya (UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Pada pasal 1 butir 2 dan 5, pengertian dari zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengertian Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Zakat harus memiliki mekanisme dan sistem kontrol yang jelas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan lembaga terkait. Dengan adanya kewajiban membayar zakat maka orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan menjadi amal ibadah bagi yang membayarnya.

### **2.3.5 Zakat Sebagai PAD**

Zakat ditetapkan sebagai PAD dimulai sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pemerintah daerah lainnya seperti dalam Undang-undang tentang pemerintah daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami tentang zakat sebagai PAD dalam kaitannya syariat Islam, diantaranya kewenangan Baitul Mal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 191 ayat (1) meliputi



pengelolaan Zakat, harta wakaf dan harta agama. Khusus zakat telah ditetapkan sebagai PAD sebagaimana pasal 180 ayat (1) huruf d, lalu bagaimana status harta wakaf dan harta agama, apakah sebagai PAD atau bukan. Hal ini juga tidak diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Zakat yang dipungut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak dapat dikelompokkan sebagai PAD murni sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga dalam pasal 24 ayat (2) "Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh". dan ayat (3) "PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur".

Zakat sebagai pendapatan daerah dibentuk berdasarkan pada para pakar dan tokoh masyarakat Aceh yang ingin Zakat dikelola dengan baik di Aceh. Ide ini datang dari Kekhawatiran masyarakat saat melihat perkembangan lembaga zakat terutama dari sudut pandang manajemen sangat lambat. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, apalagi zakat memiliki potensi yang paling besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam pemberantasan kemiskinan di Aceh. Aturan zakat sebagai pendapatan asli daerah di Aceh sama dengan kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Kebijakan fiskal ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membuat perubahan pada sistem



pajak atau pengeluarannya dengan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi saat ini (Hastuti, 2018).

Jika zakat diartikan sebagai PAD, seharusnya zakat dapat digunakan untuk mendanai belanja daerah (biasanya sama dengan PAD). Namun kondisi ini melanggar ketentuan syariat yang sudah mengatur tentang pengelolaan zakat oleh amil (Baitul Mal) bagi mustahik yang ditetapkan dalam setiap asnaf. Hal ini terjadi di Aceh di Provinsi dan Kota Baitul Mal yang saat ini belum memiliki solusi yang spesifik dan komprehensif (Musa, 2016)

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, pemerintah memberikan keleluasaan kepada pengelola keuangan (zakat) Baitul Mal, yang dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan pelayanan, terutama bagi mustahik zakat.

- a. Zakat sebagai PAD harus diperhatikan dan diatur secara khusus. Dalam hal ini ditentukan bahwa jika zakat tidak tersalurkan seluruhnya pada tahun tersebut, maka tidak perlu disetorkan ke kas daerah. Mekanisme yang diusulkan disimpan dalam rekening khusus yang tidak diserahkan ke penerima lain.
- b. Penyediaan mekanisme pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang lebih fleksibel namun terencana berdasarkan peraturan Syariah untuk ditinjau dan disetujui sebagaimana ditentukan dalam keputusan dewan pertimbangan syariah.

- c. Harus ada ketegasan dalam mengatur zakat sebagai pengeluaran barang dan jasa oleh APBA dalam bentuk pengaturan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggung jawaban, pelaporan, evaluasi dan pemantauan zakat dan informasi yang dilakukan oleh Bapel BMA. Di sisi lain, masih ada persepsi bahwa zakat sebagai PAD harus dikelola oleh sekretariat sebagai pengguna anggaran. Dalam hal ini, penting untuk menekankan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pelaksana dan Sekretariat.
- d. Perlu ditetapkan bahwa zakat dapat digunakan sebelum anggaran disetujui sesuai dengan penerimaan zakat untuk tahun berjalan. Dalam hal ini, kepala Baitul Mal dapat memerintahkan kepada Kepala Sekretariat untuk mencairkan zakat pada Dinas Keuangan.
- e. Zakat sebagai PAD, dapat dikelola Baitul Mal sebagai lembaga independen, karena UUPA memerintahkan Baitul Mal diatur dengan Qanun Aceh. Karena itu dalam pengelolaan zakat tidak menggunakan UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sejumlah aturan lainnya yang berhubungan dengan PAD.
- f. Pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan oleh Bapel Baitul Mal Aceh, sehingga diperlukan pengaturan lebih rinci, misalnya pada saat verifikasi dokumen penyaluran ZIS. Oleh karena itu, harus ada petugas verifikasi, petugas

pemeriksa barang/jasa, dan petugas penjaga barang. Perlu juga mengatur mekanisme pembelian barang dan jasa dengan menggunakan ZIS, kemitraan dengan pihak ketiga, dan tata cara pembelanjaan berupa barang dan dana langsung serta pengiriman uang. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pelaporan bulanan dan tahunan (kepada Kabag Keuangan Sekretariat, Dinas Keuangan, dan Gubernur), termasuk koneksitas pengelolaan zakat dengan sekretariat, karena hal dan tugas-tugas ini dilakukan secara rutin sehingga harus diatur melalui qanun.

- g. Mengenai corak mekanisme pertanggung jawaban, ada alternatif yang bisa dijadikan contoh. Keberadaan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, memang tidak berlaku bagi Baitul Mal, karena keberadaan Baitul Mal telah diatur dalam UUPA dan Baitul Mal harus mengatur mekanisme pertanggungjawaban zakat dalam qanun. Hanya saja mekanisme pertanggungjawaban dan realisasi zakat dapat menggunakan pola dari pengaturan Permendagri.

### **2.3.6 Hikmah Zakat**

Dalam berzakat banyak hikmah yang bisa dipetik, hikmah tersebut tidak hanya bagi yang membayar atau menerima zakat tetapi juga untuk banyak faktor, diantaranya:

1. Sebagai wujud iman kepada Allah Swt,
2. Zakat mengajarkan untuk berinfaq dan berbagi,
3. Zakat dapat menghindari dari cinta dunia,
4. Zakat menarik rasa simpati kepada sesama,
5. Zakat dapat menolong orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, ,
6. Terhindar dari sifat kikir, iri dan dengki.
7. Terbentuknya hubungan yang harmonis antara orang yang memiliki kelebihan harta dan orang yang kekurangan dan memberi keberkahan atas harta yang dimiliki,
8. Sumber anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan umat Islam, seperti lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta untuk pembersihanmuzaki (Riwayati & Hidayah, 2018).

### **2.3.7 Peran Zakat dalam Perekonomian**

Menurut (Romdhoni, 2017) Dengan pemberdayaan zakat dan mengelola zakat dengan professional dapat membantu mensejahterakan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Kewajiban membayar zakat untuk pembangunan merupakan realisasi pembangunan sosial. Menerapkan zakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan dan aktifitas ekonomi bertujuan unuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya pelaksanaan zakat memiliki fungsi pembangunan sosial. Hal ini umumnya

terlihat dalam dua hal: program distribusi kekayaan dan upaya pemberdayaan masyarakat (Adawiyah, 2018).

Menurut Dimiyati (2018) Zakat dapat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat miskin dan membangun hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan golongan miskin. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam konteks ekonomi makro, zakat bisa dijadikan sebagai instrument yang mampu meningkatkan investasi, produksi, dan untuk bekerja (Rini dkk., 2017)

Pendistribusian zakat pada kegiatan yang bersifat produktif dapat menyentuh semua aspek kehidupan. Pratama (2015) mengatakan bahwa, zakat juga harus digunakan untuk investasi jangka panjang. Zakat didistribusikan untuk memotivasi orang miskin untuk bekerja atau mencari nafkah sendiri. Dan sebagian dari zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produksi bagi fakir miskin. Misalnya, zakat dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan produksi dan pengembangan teknologi untuk memberikan modal kerja atau dukungan modal awal. Apabila pendistribusian zakat dalam kegiatan yang bersifat produktif dapat terlaksana maka akan membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Priyono (2017) dalam penelitiannya menjelaskan Potensi zakat dan penyaluran zakat yang produktif akan kembali

memperkuat perekonomian nasional. Optimalisasi peran zakat dapat menggerakkan sektor riil khususnya usaha kecil dan pertanian. Perkembangan di sektor riil diharapkan dapat meningkatkan ketahanan indikator ekonomi utama terhadap ancaman krisis dan mengurangi ketergantungan negara terhadapnya. Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Karena sifatnya tetap dan berulang, zakat memungkinkan pemerintah untuk strategi jangka panjang dalam memerangi kemiskinan. Dalam membelanjakan dana zakat, diprioritaskan harus diberikan kepada orang miskin di wilayah yang sama dari mana ia berasal dikumpulkan. Ini menciptakan perasaan solidaritas yang sehat antara orang kaya dan miskin di wilayah itu (Hassan dkk, 2007). Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui Pertama, zakat dapat mencerminkan keimanan. Kedua, Sumber dana zakat tidak akan pernah berhenti, artinya mereka yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan akan terus membayar setiap tahun atau pada waktu yang berbeda. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghilangkan ketimpangan sosial dan sebaliknya menciptakan beban aset dan pemerataan pembangunan (Lapopo, 2017).

## **2.4 Dana Otonomi Khusus**

Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus menyatakan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus suatu provinsi yang telah disetujui dan diberikan oleh

negara untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, otonomi berarti hak yang diberikan kepada penduduk suatu wilayah etnis tertentu yang tidak memiliki kedaulatan (politik) sendiri untuk menjalankan yurisdiksi eksekutif.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,” sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.

#### **2.4.1 Pembagian Daerah-daerah Otonomi khusus**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah khusus maupun istimewa kegiatannya diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah yang khusus dan istimewa merupakan daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



#### **2.4.2 Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh**

Aceh merupakan provinsi dengan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Otonomi Khusus Aceh dimulai sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diberlakukan. Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Pada Pasal 183 ayat (2) disebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dengan rincian (1) tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% plafon DAU nasional dan (2) tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1% plafon DAU nasional.

Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 jo Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana



Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027. Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus. Dalam Rencana Induk Otonomi Khusus Aceh terdapat tujuan Otonomi Khusus Aceh untuk mewujudkan (1) integrasi program pembangunan berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah, ruang, dan waktu; (2) keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, dan (3) pewujudan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, serta berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **2.4.3 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus**

Pemanfaatan dana otonomi khusus akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain, pembangunan bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan social. Terdapat dalam Pasal 183 UU. No 11 Tahun 2006 yaitu:

1. Dana kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, digunakan untuk penyediaan obat-obatan pada Rumah Sakit, agar setiap rakyat Aceh yang berobat tidak dipungut bayaran, Pembangunan pos-pos kesehatan, memberikan bonus pada para medis dan lain-lain.

2. Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Aceh mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, membangun asrama-asrama mahasiswa yang melanjutkan studi di luar Provinsi Aceh, mensubsidi Yayasan-yayasan pendidikan dan lain-lain.
3. Dana pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), digunakan untuk membantu pemberian modal kepada rakyat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonomi.
4. Dana Infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, jalan-jalan yang konsentrasi pemukiman rakyat Aceh, rehabilitasi atau membangun rumah-rumah sederhana untuk rakyat Aceh yang tidak mampu dan lain sebagainya.
5. Dana Sosial yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Sosial, digunakan untuk membantu rakyat Aceh dalam pengetasan masalah sosial, korban bencana alam, meningkatkan kesejahteraan sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

Program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya

diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh. Kewenangan yang telah diberikan kepada daerah tentunya dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebab pemberian dana otonomi khusus pada hakikatnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sehingga pengalokasian anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah Aceh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

#### **2.4.4 Mekanisme Penggunaan Dana Otonomi Khusus**

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan Gas Bumi dan penggunaan dana otonomi khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan antara Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh. Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2008 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain itu Dana Otonomi Khusus dapat juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh;
- b. Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dana Otonomi khusus dibagi antar kabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan suatu formula yang memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota. Formula penghitungan besaran alokasi menggunakan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan indikator lainnya yang relevan yang ditetapkan oleh Gubernur. Pengalokasian anggaran tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA. Dalam pengalokasian dan penggunaan dana tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi serta dana otonomi khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh dengan mempertimbangkan keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota serta mempertimbangan pula kontribusi daerah penghasil. Pengalokasian Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :

- a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/kota penghasil;

- b. 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/kota non penghasil, dengan perincian :
  - 1. 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
  - 2. 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator lainnya yang relevan.
- c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh dan Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh dan Kabupaten/Kota, serta Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (RKPK). Pendanaan Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dianggarkan dalam APBA.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/ Tahun	Metode	Hasil
1	Rini, dkk (2017)	Penghitungan ketimpangan dan kemiskinan yang digunakan adalah LorenzCurve, Gini Coefficient, Atkinson Index, Headcount Ratio, Poverty Gap Index, Income Gap Index, Sen Index dan FGT Index.	keberadaan distribusi zakat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor.
2	Afifudin dkk (2019)	Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh zakat dan infaq terhadap penurunan kemiskinan di Aceh dengan menggunakan uji t dan uji f.	dana Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, tingginya zakat infak dan shadaqah dapat dimaknai untuk mengurangi kemiskinan di wilayah/kota provinsi Aceh
3	Najmi (2019)	Metode yang digunakan adalah dengan analisis regresi data panel. Hasil uji hausman (hausman test) menunjukkan bahwa model terbaik untuk data panel ini adalah random effect model.	dana Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.
4	Amri (2020)	Menggunakan data panel 23 kabupaten/ kota di Aceh selama periode tahun 2011-2017, model regresi panel metode fixed effect dan Granger causality test digunakan untuk menganalisis hubungan fungsional antara ketiga variabel tersebut	Zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah zakat dapat mengurangi kemiskinan.

No	Peneliti/ Tahun	Metode	Hasil
5	Mantsani dkk., (2020)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda	dana otonomi khusus berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
6	Muliadi dkk (2019)	Menggunakan data panel 15 kabupaten kota di Aceh selama periode 2011-2016, Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menganalisis hubungan fungsional tersebut.	otonomi khusus sebagai pemoderasi menemukan dana otonomi khusus memiliki hubungan berpengaruh positif dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Aceh.
7	Prasetyoni ngrum (2018)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS dengan data panel yang merupakan data time series periode 2013-2017 dan data cross section dari 33 provinsi di Indonesia. Pengolahan datanya menggunakan metode analisis jalur menggunakan software WarpPLS 5.0	IPM berpengaruh secara langsung negatif terhadap tingkat kemiskinan.
8	Alhudhori (2017)	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan data antar ruang (cross section) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2016.	IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin dimana jika IPM naik maka jumlah penduduk miskin akan naik.
9	Kumar ddk, (2016)	data indeks pemanfaatan air berkelanjutan diperoleh dari indeks kemiskinan air (WPI); indeks pembangunan manusia (IPM) dan produk domestik bruto (PDB) per kapita untuk 145 negara,	menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara dalam pembangunan manusia tidak ada hubungannya dengan kemakmuran ekonominya dan bahwa pembangunan



No	Peneliti/ Tahun	Metode	Hasil
		indeks kemiskinan manusia untuk 113 negara, dan indeks kelaparan global (GHI) untuk 117 negara dianalisis.	manusia yang baik dapat dicapai bahkan pada tingkat yang rendah.

Penelitian Rini dkk. (2017) berkaitan dengan peran dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, disimpulkan bahwa keberadaan distribusi zakat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor sebesar 44% dilihat dari nilai *headcount ratio*.

Afifudin & Sari (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh zakat, infaq terhadap penurunan kemiskinan di Aceh menemukan zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Setiap kali dana zakat yang terkumpul meningkat sebesar 1 persen, maka angka kemiskinan akan berkurang sebesar 16,5 persen. Najmi (2019) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa dana Zakat berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, tingginya zakat dapat dimaknai untuk menurunkan kemiskinan di wilayah/kota provinsi Aceh. Amri (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh penerimaan zakat dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan. Menggunakan data panel 23 kabupaten/kota di Aceh selama periode tahun 2011-2017, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat serta kesempatan kerja berpengaruh negatif dan



signifikan terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah zakat dapat mengurangi kemiskinan.

Mantsani dkk., (2020) dalam penelitiannya mengenai determinan kemiskinan menemukan bahwa dana otonomi khusus berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti penambahan transfer dana otonomi khusus meningkatkan persentase penduduk miskin, meski masih dalam persentase yang sangat kecil. Penyebabnya adalah pemerataan pemberian dana otonomi khusus di masing-masing kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan yang sangat besar. Terjadinya ketimpangan ini berdampak pada pembiayaan masing-masing kabupaten/kota untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga transfer yang dilakukan tidak efektif. Akibatnya, tidak menurunkan kemiskinan malah menambah kemiskinan meskipun tidak signifikan. Sedangkan penelitian Muliadi & Amri, (2019) tentang penerimaan zakat dan penurunan kemiskinan di Aceh dengan peran dana otonomi khusus sebagai pemoderasi menemukan dana otonomi khusus memiliki hubungan berpengaruh positif dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Aceh. Dana otonomi khusus memberikan pengaruh lebih besar pada pengurangan kemiskinan sebagai alat kebijakan fiskal daerah.

Para peneliti sebelumnya menunjukkan adanya keterkaitan antara IPM dengan kemiskinan hingga saat ini terdapat temuan empiris bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian Prasetyoningrum (2018) Tentang Analisis

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara langsung negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai IPM menurunkan angka kemiskinan. Berkurangnya kemiskinan akibat peningkatan IPM menunjukkan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas manusia, sehingga dapat meningkatkan pendapatan agar terpenuhinya kebutuhan hidup yang berkualitas. Sebelumnya penelitian Alhudhori (2017) menemukan IPM memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, dengan meningkatnya IPM, maka jumlah penduduk miskin juga akan meningkat.

## **2.6 Keterkaitan antar Variabel**

Dalam Islam, zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin. Zakat merupakan alat yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan dukungan mustahik yang mampu menegeluarkan zakat dari dari hartanya, maka akan menurunkan kemiskinan pada masyarakat. Dengan dukungan mustahik, yang dapat menggunakan kekayaannya dalam bentuk dana zakat, maka akan mengurangi kemiskinan dari kehidupan masyarakat. Jika zakat didistribusikan sesuai prioritas dan tepat sasaran yaitu kepada orang yang berhak menerimanya maka akan membantu orang miskin yang membutuhkan serta menguntungkan perekonomian. Zakat akan mengurangi kemiskinan dan akan berdampak pada meningkatnya

lapangan pekerjaan serta pendapatan sehingga penerimaan zakat juga meningkat, dan memberi pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan. Sedangkan dampak dana zakat terhadap kemiskinan terjadi langsung dari muzakki kepada mustahiq zakat melalui transfer pendapatan dari muzakki kepada mustahiq zakat, dampak belanja modal terjadi secara tidak langsung melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembiayaan pendidikan dan kesehatan (Amri, 2020).

Berdasarkan penelitian Rini dkk. (2017) tentang peran dana zakat dalam mengurangi kemiskinan menemukan bahwa dana zakat telah menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini mengindikasikan zakat mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan. Penelitian Afifudin & Sari (2019) hasil penelitiannya menyatakan zakat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Setiap dana zakat terkumpul naik maka angka kemiskinan akan menurun.

Otonomi khusus erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan. Otonomi Khusus menjadi peluang yang sangat baik bagi Aceh untuk mencapai percepatan pembangunan melalui program-program yang ditetapkan secara hukum. Program tersebut adalah pembangunan, khususnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan pembiayaan kesehatan. Alokasi dana otonomi khusus untuk kegiatan pembangunan, baik di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan lebih cepat.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah menyebabkan pada rendahnya perolehan pendapatan. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah. Jadi, ketika pendapatannya rendah, akan meningkatkan jumlah orang miskin.

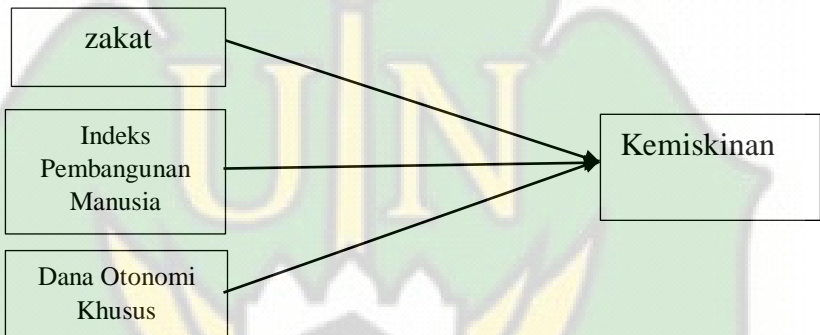
## **2.7 Kerangka Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, dana otsus, IPM dan zakat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Aceh melalui . Adanya keterkaitan antara zakat dengan belanja modal dan kemiskinan, tidak hanya dijelaskan secara teoritis, tetapi juga diperkuat dengan hasil penelitian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti temuan Munandar dkk. (2020) antara lain menyimpulkan bahwa jika penyaluran dana zakat meningkat maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sebelumnya Najmi (2019) juga menyimpulkan bahwa dana zakat, infak, sadaqah, dan pendapatan asli daerah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Selanjutnya Muliadi & Amri (2019) belanja daerah mendukung kegiatan pembangunan sehingga

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan pada Provinsi Aceh tentunya dapat dikaitkan dengan zakat, dana otonomi khusus dan IPM melalui. Karena itu, kerangka penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.2

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Penelitian**



Kerangka penelitian gambar 2.2 di atas menjelaskan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh zakat, indeks pembangunan manusia dan dana otonomi khusus terhadap kemiskinan. Alat yang akan digunakan yaitu regresi dinamis menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek variabel penelitian tersebut.

## 2.8 Hipotesis Penelitian

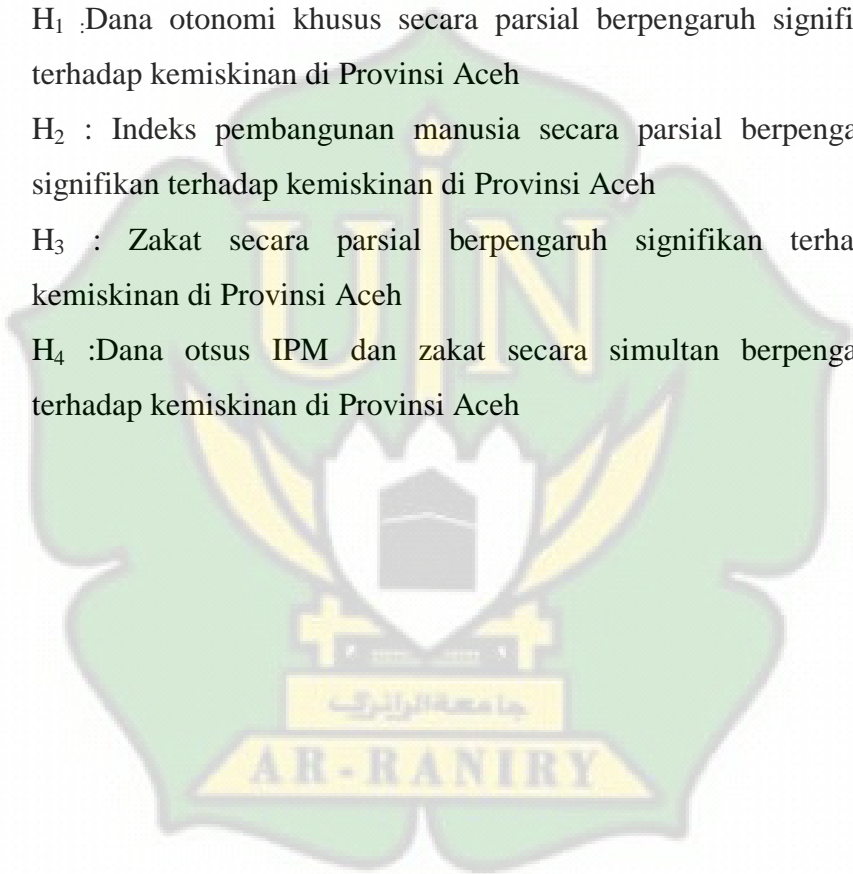
Berdasarkan latar belakang penelitian, temuan peneliti terkait dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> :Dana otonomi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

H<sub>2</sub> : Indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

H<sub>3</sub> : Zakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

H<sub>4</sub> :Dana otsus IPM dan zakat secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan analisis kausalitas dengan metode analisis ARDL. Penelitian kausalitas merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruhantara variabel dana otonomi khusus, IPM, zakat dan kemiskinan.

### **3.2 Jenis data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, bersumber dari Badan Pusat Statistik, Baitul Mal, dan Bappeda. Data sekunder ialah data primer yang sudah diolah lebih lanjut serta disajikan oleh pihak pengumpul data, data sekunder bisa diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Data internal merupakan data yang diperoleh dari dari lembaga maupun industri tempat riset dilakukan sebaliknya data eksternal ialah data yang didapat dari Badan pusat Statistrik. Adapun objek dalam penelitian ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dari tahun 2014 hingga 2018.

### **3.3 Operasional Variabel**

Operasional merupakan penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Operasional variabel penelitian ini terdiri dari jumlah penduduk



miskin sebagai variable dependen(terikat), zakat sebagai variabel independen (bebas), dana otsus sebagai variabel independen(bebas) dan IPM sebagai variabel independen (bebas). Masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dalam periode tahun tertentu dinyatakan dengan satuan persen.
2. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam yang dapat menyalurkan (muzakki) kepada umat Islam lainnya (mustahik) di ukur dengan satuan rupiah.
3. Dana Otonomi Khusus adalah sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, khususnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diukur dengan satuan rupiah.
4. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator bagaimana penduduk memiliki akses terhadap hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. diukur dengan satuan rupiah.



**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Deskripsi	Skala Pengukuran
Kemiskinan	Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dalam periode tahun tertentu dinyatakan dengan satuan persen.	Ribu Jiwa
Zakat	Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam yang dapat menyalurkan (muzakki) kepada umat Islam lainnya (mustahik) diukur dengan satuan rupiah.	Rupiah
Dana Otonomi Khusus	Dana Otonomi Khusus adalah sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, khususnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diukur dengan satuan rupiah.	Rupiah
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator bagaimana penduduk memiliki akses terhadap hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. diukur dengan satuan rupiah.	Persen

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), suatu model ekonometrika dinamis yang menggambarkan alur waktu suatu variabel terikat terhadap nilai masa lalunya. ARDL adalah kombinasi dari teknologi *Autoregressive* (AR) dan *Distributed Lag* (DL). Lag artinya nilai masa lalu digunakan untuk melihat nilai masa depan. Metode AR adalah metode yang menggunakan satu atau lebih data historis variabel terikat, dan DL adalah metode regresi yang mencakup data sekarang dan data historis variabel bebas. Metode ini bertujuan untuk melihat pengaruh antar variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kelebihan dari model ARDL adalah:

- a) ARDL tidak mementingkan tingkat stasioner data pada urutan yang sama, tetapi tidak bisa digunakan jika data stasioner pada tingkat 2 difference
- b) ARDL tidak terpengaruh oleh jumlah sampel atau pengamatan yang sedikit.

Dengan menggunakan ARDL, perkiraan jangka panjang dan jangka pendek dapat diperoleh secara bersamaan, yang akan terhindar dari masalah autokorelasi.

Berikut merupakan langkah-langkah analisis data penelitian ini dengan metode ARDL:

- 1) Langkah pertama, melakukan uji stasioneritas pada semua variabel agar mengetahui variabel tersebut stasioner atau tidak.
- 2) Pilih model ARDL yang digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi koefisien jangka panjang dan jangka pendek. Model ARDL dipilih berdasarkan *Schwarz Bayesian Criterion* (SBC), yang memungkinkan pemilihan panjang lag minimum, atau *Akaike Information Criterion* (AIC), yang memungkinkan pemilihan panjang lag maksimum terkait.
- 3) Menguji apakah model ARDL yang dipilih sudah sesuai.
- 4) Bounds test, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan jangka panjang (kointegrasi) dan kausalitas antar variabel yang digunakan dalam model.

#### **3.4.1 Uji Stasioneritas Data (*Unit Root Test*)**

Data panel merupakan data gabungan antara cross section dan time series. Seperti diketahui, data time series bisa mengandung unit root. Pengujian unit root untuk data time series biasa tidak bisa diterapkan pada data panel. Apabila data panel mengandung unit root maka *Augmented dickey-fuller* (ADF) test dan Philips Perron test biasa yang disebutkan sebelumnya tidak bisa digunakan.

Motivasi utama dari panel data unit root test adalah untuk meningkatkan power dari *unit root test* dengan meningkatkan

ukuran sampel. Namun alternatif dengan menggunakan deret data yang lebih panjang menyebabkan masalah karena munculnya perubahan struktural. Namun memang tidak terlalu jelas apakah masalah akibat long time series data lebih parah dari masalah heterogenitas karena menggunakan data panel dan struktural. Unit root test yang sering digunakan, yaitu uji ADF, tidak terlalu kuat, dan dengan menggunakan data panel kita akan mendapatkan tes yang lebih kuat.

Im Pesaran Shin test (IPS test) merupakan unit root test untuk dynamic heterogenous panels berdasarkan rata-rata dari individual unit root statistics. Secara khusus, tes ini mengusulkan standardized 1 bar statistics berdasarkan DF/ADF statistik yang dirata ratakan di antara grup.

### **3.4.2 Uji Kointegrasi**

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi ARDL. Uji kointegrasi ARDL bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kointegrasi antar variabel penelitian. Jika terdapat kointegrasi, maka terdapat hubungan jangka panjang pada setiap variabel dalam penelitian ini.

Kriteria yang dilihat untuk menentukan uji kointegrasi ARDL yaitu jika nilai F-statistik lebih kecil dari nilai  $I(0)$  Bound, maka tidak ada kointegrasi antar variabel atau tidak ada hubungan jangka panjang antar variabel. Sebaliknya, jika nilai statistik berada di antara atau lebih besar dari nilai  $I(1)$  Bound, maka ada

kointegrasi antar variabel atau ada hubungan jangka panjang antar variabel.

### 3.5 Uji Statistik

Pengujian hipotesis menggunakan statistik uji t dan uji F. Masing-masing pengujian tersebut sebagai berikut.

a. Statistik uji t

Statistik uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen (zakat,dana otonomi khusus dan IPM) secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Jika t hitung suatu variabel lebih besar dari nilai t tabel maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
- Jika t hitung suatu variabel lebih kecil dari nilai t tabel maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

b. Statistik uji F

Statistik uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh zakat dan belanja modal provinsi secara simultan terhadap kemiskinan. Jika nilai F hitung  $>$  F tabel maka secara simultan zakat,dana otonomi khusus dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

c. Uji  $R^2$  (Uji Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar dari 0 hingga 1. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang rendah berarti bahwa variabel independen memiliki kemampuan terbatas untuk menjelaskan variabel dependen, dan koefisien determinasi yang mendekati 1 memberikan variabel independen semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

### **3.6 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi merupakan asumsi utama yang harus dibuat dalam analisis termasuk tidak ada autokorelasi pada nilai residu. Artinya, nilai residu tidak bergantung pada nilai residu sesudah ataupun sebelum. Uji autokorelasi yang umum adalah uji Bruche-Godfrey. Salah satu kelemahan uji Durbin-Watson adalah hanya menghitung autokorelasi pada lag1, tanpa melihat atau memeriksa autokorelasi lag2, lag3, dan lainnya. Koefisien autokorelasi lag-t sebenarnya paling besar dibandingkan dengan koefisien korelasi lag berikutnya. Namun, koefisien lag1 signifikan dan koefisien autokorelasi lag2 perlu dikonfirmasi. Uji Bruche-Godfrey dilakukan dengan meregresi variabel campuran menggunakan model autoregressive.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

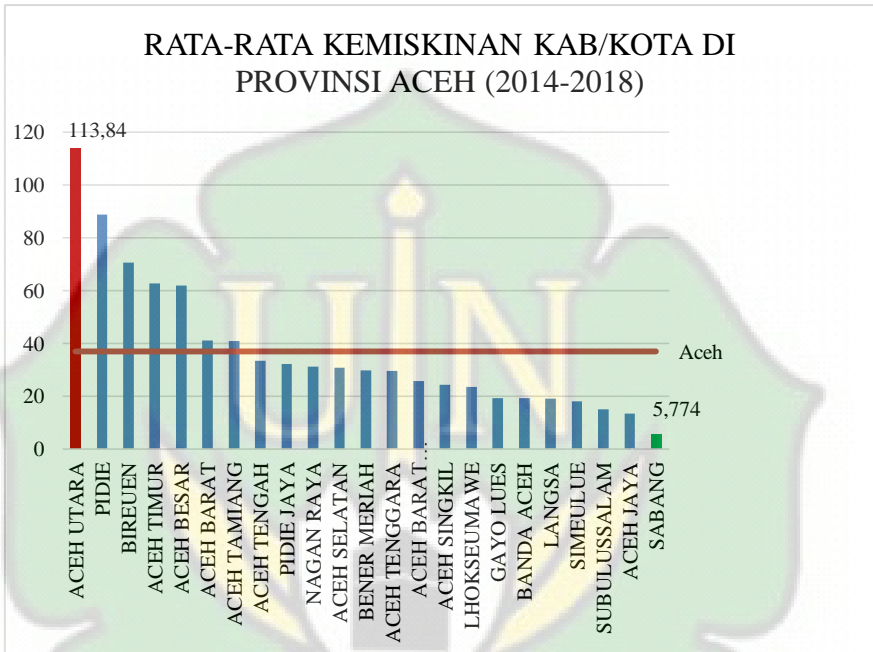
#### **4.1 Statistika Deskriptif**

Statistika deskriptif merupakan statistika yang memiliki kegunaan mencakup cara-cara mengumpulkan data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan data dan menganalisis data angka. Dalam hal ini agar bisa memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas, mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Analisis statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik penduduk miskin dan variabel yang diduga berpengaruh. Objek dalam penelitian ini adalah kemiskinan di Provinsi Aceh dan variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Adapun variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah zakat, dana otonomi khusus dan indeks pembangunan manusia. Hasil analisis deskriptif yang diperoleh pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

##### **4.1.1 Rata-Rata Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

Kemiskinan merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dengan data 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

**Gambar 4.1**  
**Rata-Rata Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota**  
**di Provinsi Aceh**



Sumber: BPS (diolah,2021)

Pada tabel 4.1 dapat dilihat parameter statistik deskriptif yang memperlihatkan nilai rata-rata kemiskinan Provinsi Aceh adalah sebesar 36,95 ribu jiwa dan kemiskinan tertinggi adalah sebesar 113,84 ribu jiwa yang berada di Kabupaten Aceh Utara. Sementara kemiskinan dengan rata-rata terendah berada di Kota Sabang yaitu sebesar 5,77 ribu jiwa dari tahun 2014 sampai 2018.

Kabupaten Aceh Utara termasuk salah satu kabupaten dengan kawasan industri terbesar di Provinsi Aceh. khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT. Arun



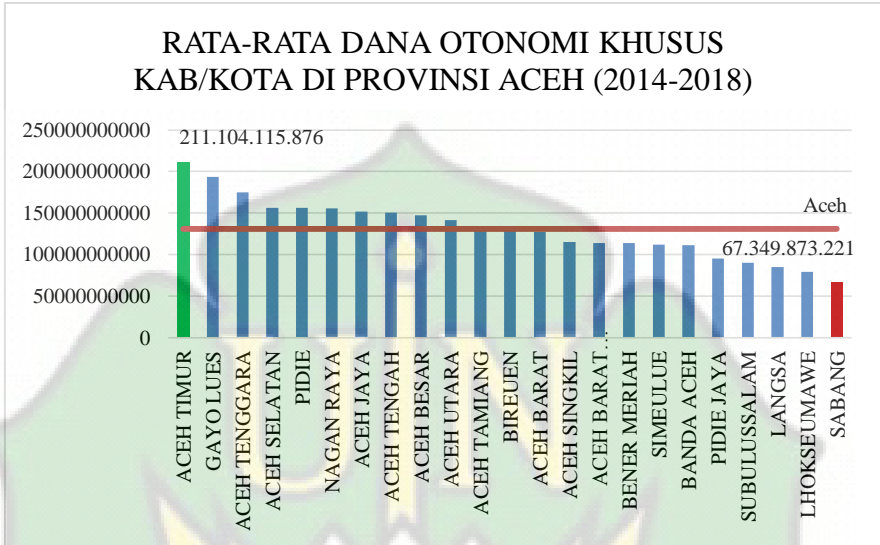
LNG, Pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM). Dibidang perkebunan sendiri Aceh Utara memiliki perkebunan kelapa sawit, karet, kakao perkebunan tebu yang diproduksi menjadi gula di pabrik gula Cot Girek.

Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan rata-rata jumlah kemiskinan paling tinggi di Provinsi Aceh dan melebihi rata-rata kemiskinan Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan karena Aceh Utara memiliki penduduk terbanyak di dibandingkan dengan daerah lain. Seharusnya dengan dibukanya kawasan industri di kabupaten ini tidak berada pada tingkat tertinggi pada rata-rata jumlah kemiskinan.

#### **4.1.2 Rata-Rata Dana Otsus Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

Meskipun Dana Otonomi Khusus merupakan salah satu indikator pengentasan kemiskinan, namun penyalurannya cenderung berfluktuasi setiap tahun seperti terlihat pada gambar 4.2.

**Gambar 4.2**  
**Rata-Rata Jumlah Dana Otsus Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**



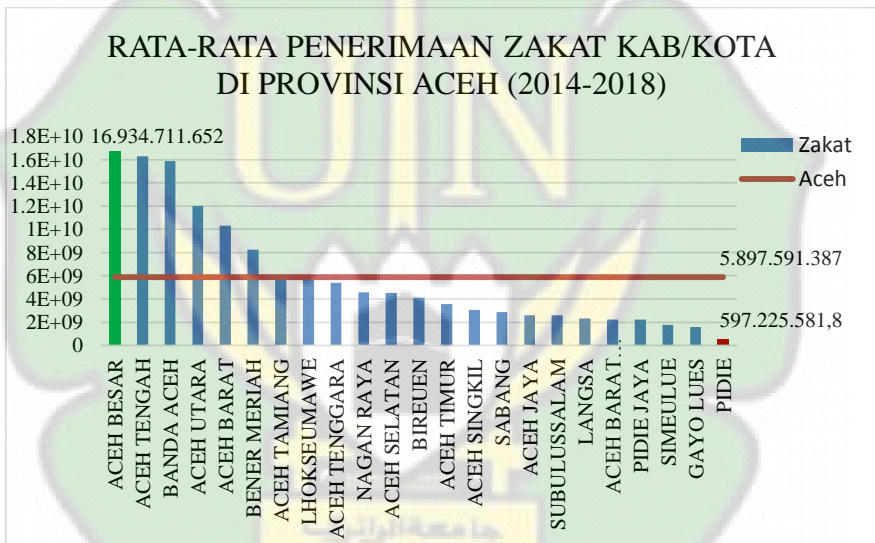
Sumber: BAPPEDA (diolah,2021)

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan rata-rata jumlah dana otonomi khusus yang diterima oleh pemerintah kota di provinsi Aceh selama lima tahun dari 2014 hingga 2018. Rata-rata jumlah dana otonomi khusus Provinsi Aceh adalah sebesar Rp 130.960.471.273,-. Kabupaten Aceh Timur merupakan kabupaten dengan rata-rata jumlah dana otsus tertinggi yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 211.104.115.876,-. Sedangkan Kota Sabang yang memiliki rata-rata jumlah dana otsus yang diterima paling rendah dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 62.349.873.221,-.

### 4.1.3 Rata-Rata Zakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Zakat merupakan salah satu indikator dalam mengurangi angka kemiskinan. Penerimaan zakat cenderung meningkat setiap tahunnya, akan tetapi kurang Optimal dalam merealisasikan dana zakat seperti yang terdapat pada gambar 4.3.

**Gambar 4.3**  
**Rata-Rata Zakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**



Sumber: Baitul Mal (diolah, 2021)

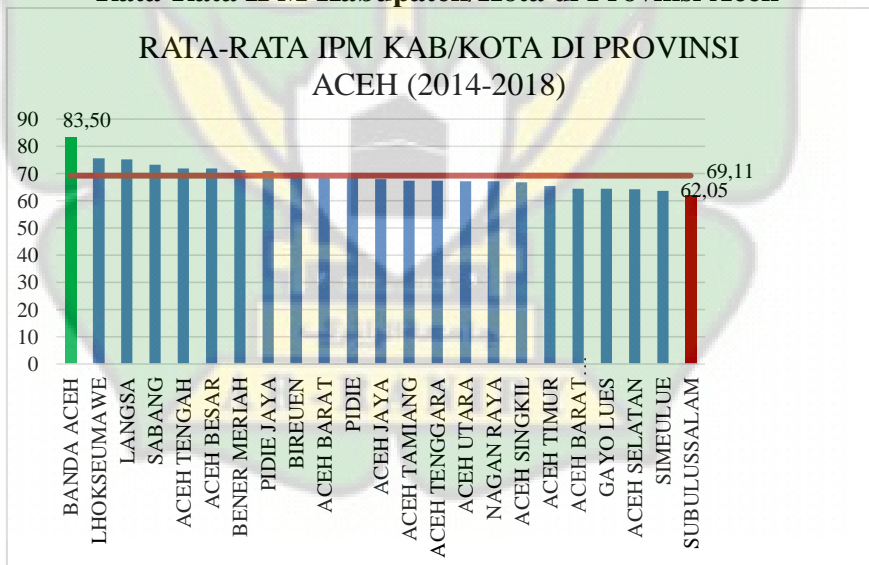
Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan rata-rata jumlah penerimaan zakat kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2014 sampai 2018. Rata-rata jumlah penerimaan zakat yang diterima Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp5.897.591.387,-. Kabupaten Aceh Besar yang memiliki rata-rata Penerimaan zakat paling tinggi dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 16.934.711.652,-. Sedangkan

Kabupaten Pidie yang memiliki rata-rata penerimaan zakat paling rendah dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp.59.725.581,8,-.

#### 4.1.4 Rata-Rata IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran atas pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sehingga IPM menjadi salah satu indikator dalam mengurangi kemiskinan. Rata-Rata IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar 4.1.4.

**Gambar 4.4**  
**Rata-Rata IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**



Sumber: BPS (diolah,2021)

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2014 sampai 2018. Kota Banda Aceh yang memiliki

rata-rata IPM paling tinggi dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar 83,50%. Sedangkan Kota Subulussalam yang memiliki rata-rata IPM paling rendah dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar 62,05%. Pada gambar 4.4. juga disebutkan rata-rata IPM Provinsi Aceh yaitu sebesar 69,11.

#### 4.2 Stasioneritas

Langkah pertama dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode ARDL yaitu dengan melakukan uji stasioneritas (*unit root test*). Uji stasioneritas bertujuan untuk dapat mengetahui pada tingkat berapa data stasioner. Dalam penelitian ini, uji stasioneritas yang digunakan adalah metode Augmented Dickey Fuller (ADF). Jika nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha=10\%$  maka  $H_1$  diterima atau dengan kata lain data stasioner. Berikut ini merupakan hasil tes Augmented Dickey Fuller (ADF)

**Tabel 4.1 Hasil Uji Unit Root Test**

ADF			
Variabel	P-value	Nilai Kritis $\alpha=10\%$	Keputusan
Kemiskinan	0.0000	0,1	Stasioner
Dana Otonomi Khusus	0.0000	0,1	Stasioner
IPM	0.0275	0,1	Stasioner
Zakat	0.0147	0,1	Stasioner

Sumber: Data diolah (2021)

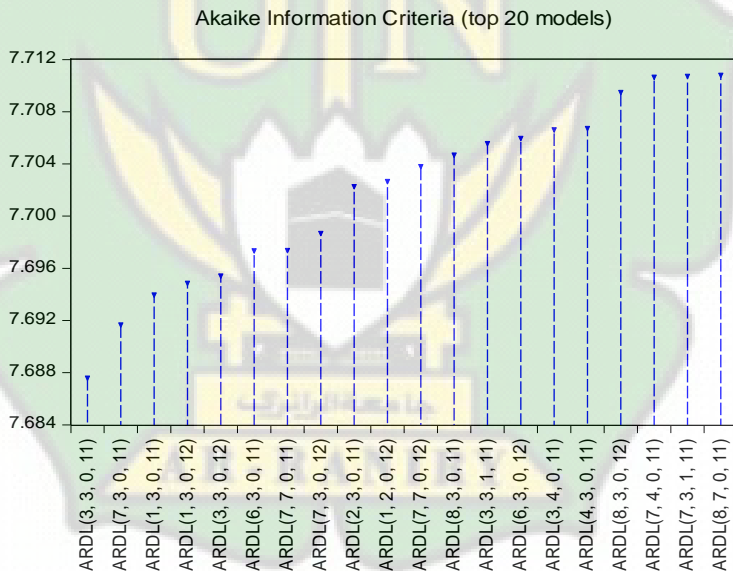
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil uji stasioneritas data dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller (ADF) pada tingkat first difference menunjukkan bahwa

nilai probabilitas dari semua variabel yaitu variabel kemiskinan, dana otsus, IPM, dan zakat lebih kecil dari  $\alpha=10\%$ . Maka artinya seluruh data variabel yang digunakan sudah stasioner.

### 4.3 Uji Lag Optimal

Dalam penelitian ini, penentuan panjang lag menggunakan pendekatan akaike information criteria. Hasil pengujian lag optimum ditunjukkan pada gambar 4.5.

**Gambar 4.5**  
**Panjang Lag optimal**



Pada gambar 4.5 terdapat 20 top model. Namun model yang cocok untuk metode ARDL dalam penelitian ini adalah ARDL (3,3,0,11) karena memiliki error yang lebih kecil jika dibandingkan model ARDL lainnya.

#### 4.4 Estimasi Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

Berikut ini merupakan hasil estimasi koefisien parameter yang diperoleh dari model ARDL 3,3,0,11.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Estimasi Koefisien Parameter**

Variabel	Koefisien	Parameter	Prob.*
KEMISKINAN(t-1)	C <sub>1</sub>	0.921531	0.0000
KEMISKINAN(t-2)	C <sub>2</sub>	0.057555	0.6541
KEMISKINAN(t-3)	C <sub>3</sub>	-0.155327	0.0974
DANA_OT SUS	C <sub>4</sub>	1.45E-10	0.0073
DANA_OT SUS(t-1)	C <sub>5</sub>	4.34E-12	0.9547
DANA_OT SUS(t-2)	C <sub>6</sub>	-2.64E-10	0.0013
DANA_OT SUS(t-3)	C <sub>7</sub>	1.43E-10	0.0150
IPM	C <sub>8</sub>	-0.383708	0.2367
ZAKAT	C <sub>9</sub>	9.71E-10	0.0112
ZAKAT(-1)	C10	-4.36E-10	0.3371
ZAKAT(-2)	C11	-5.32E-10	0.2305
ZAKAT(-3)	C12	8.61E-10	0.0409
ZAKAT(-4)	C13	-6.52E-10	0.1298
ZAKAT(-5)	C14	1.70E-11	0.9710
ZAKAT(-6)	C15	6.60E-10	0.1689
ZAKAT(-7)	C16	-4.75E-10	0.2800
ZAKAT(-8)	C17	7.09E-10	0.0908
ZAKAT(-9)	C18	-3.64E-10	0.4106
ZAKAT(-10)	C19	-1.50E-09	0.0014
ZAKAT(-11)	C20	2.04E-09	0.0000
C	C21	21.70283	0.3763
<b>R-squared</b>	0.878830	<b>Akaike info criterion</b>	7.677685
<b>Adjusted R-squared</b>	0.849633	<b>Schwarz criterion</b>	8.211649
<b>F-statistic</b>	30.09946	<b>Hannan-Quinn criter.</b>	7.894009
<b>Prob(F-statistic)</b>	0.000000	<b>Durbin-Watson stat</b>	2.088094

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan output parameter pada tabel diatas, maka model ARDL 3,3,0,11 dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$\text{KEMISKINAN} = 0.921530663664 * \text{KEMISKINAN}(-1) + 0.0575551003356 * \text{KEMISKINAN}(-2) -$$



$$\begin{aligned}
& 0.155326878131 * \text{KEMISKINAN}(-3) + \\
& 1.4502769046e-10 * \text{DANA\_OTSUS} + \\
& 4.33677987903e-12 * \text{DANA\_OTSUS}(-1) - \\
& 2.63599275773e-10 * \text{DANA\_OTSUS}(-2) + \\
& 1.42996927161e-10 * \text{DANA\_OTSUS}(-3) - \\
& 0.383708446446 * \text{IPM} + 9.7107209852e- \\
& 10 * \text{ZAKAT} - 4.3628878279e-10 * \text{ZAKAT}(-1) - \\
& 5.31902229383e-10 * \text{ZAKAT}(-2) + \\
& 8.61187044643e-10 * \text{ZAKAT}(-3) - \\
& 6.52464498633e-10 * \text{ZAKAT}(-4) + \\
& 1.7017891561e-11 * \text{ZAKAT}(-5) + \\
& 6.60191975818e-10 * \text{ZAKAT}(-6) - \\
& 4.74804856759e-10 * \text{ZAKAT}(-7) + \\
& 7.09325650682e-10 * \text{ZAKAT}(-8) - \\
& 3.63673923101e-10 * \text{ZAKAT}(-9) - \\
& 1.49722194154e-09 * \text{ZAKAT}(-10) + \\
& 2.03517446295e-09 * \text{ZAKAT}(-11) + \\
& 21.7028266753
\end{aligned}$$

Variabel dependen dan independen dijelaskan berdasarkan koefisien model ARDL (3.3.0.11) yang dituliskan dalam rumus model ARDL diatas. Persamaan ini menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi variabel kemiskinan yaitu : dana otonomi khusus, IPM, zakat dan pengaruh variabel kemiskinan pada tahun sebelumnya terhadap variabel kemiskinan saat ini. Lag menunjukkan bahwa nilai suatu variabel di waktu tertentu dipengaruhi oleh nilai dari beberapa periode sebelumnya dan sebanyak lag tersebut.



#### 4.5 Uji Kointegrasi

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi ARDL. Uji kointegrasi ARDL bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kointegrasi antar variabel penelitian. Jika terdapat kointegrasi, maka terdapat hubungan jangka panjang pada setiap variabel dalam penelitian ini.

Kriteria yang dilihat untuk menentukan uji kointegrasi ARDL yaitu jika nilai F-statistik lebih kecil dari nilai I(0) Bound, maka tidak ada kointegrasi antar variabel atau tidak ada hubungan jangka panjang antar variabel. Sebaliknya, jika nilai statistik berada di antara atau lebih besar dari nilai I(1) Bound, maka ada kointegrasi antar variabel atau ada hubungan jangka panjang antar variabel. Berikut adalah hasil dari uji kointegrasi ARDL pada penelitian ini:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Kointegrasi**

Test Statistik	Value	K
F-statistic	4.210146	3
Critical value Bounds		
Signifikansi	I(0)	I(1)
10%	2.72	3.77
5%	3.23	4.35
2.5%	3.69	4.89
1%	4.29	5.61

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai F-statistik sebesar 4.210146 dan tingkat signifikansi berada di 10% dengan nilai I(0) Bound sebesar 2.72 dan nilai I(1) Bound sebesar 3.77. Hasil dari uji kointegrasi ARDL atau bounds testing cointegration menunjukkan bahwa nilai F-statistik berada di atas nilai I(1) Bound.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi antara variabel atau dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara variabel.

#### 4.5.1 Uji Estimasi Koefisien Jangka Panjang

Setelah membuktikan adanya hubungan kointegrasi antar variabel, langkah selanjutnya adalah mengestimasi koefisien jangka panjang. Berikut adalah hasil uji estimasi koefisien jangka panjang dalam penelitian ini:

**Tabel 4.5 Uji Estimasi Koefisien Jangka Panjang**

Variabel	Coefficient	Probabilitas
KEMISKINAN (Y)	0.155327	0.0974
DANA OTSUS ( $X_1$ )	-1.43E-10	0.0150
IPM ( $X_2$ )	-0.383708	0.2367
ZAKAT ( $X_3$ )	-2.04E-09	0.0000

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan dari hasil uji estimasi koefisien jangka panjang pada tabel 5 dapat dikatakan bahwa :

1. Variabel Dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -1.43E-10 yang menunjukkan nilai yang negatif dan probabilitas dana otsus sebesar 0.0150 yang signifikan pada tingkat 10%. Maka bisadisimpulkan bahwa jika dana otsus meningkat sebesar 1% akan menyebabkan penurunan pada

tingkat kemiskinan sebesar  $1.43E-10$  dan begitupun sebaliknya jika dana otsus menurun maka kemiskinan akan meningkat.

2. Variabel IPM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan dalam jangka panjang. Nilai koefisien dari variabel IPM adalah sebesar  $-0.383708$  dan memiliki probabilitas sebesar  $0.2367$  yang menunjukkan hasil tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa IPM tidak signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan.
3. Variabel zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan dalam jangka panjang. Hasil dari uji estimasi koefisien jangka panjang menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel zakat adalah sebesar  $-2.04E-9$  yang menunjukkan nilai yang negatif dan probabilitas sebesar  $0.0000$  yang signifikan pada tingkat  $10\%$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa meningkatnya zakat sebesar  $1\%$  akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar  $2.04E-9$  dan begitupun sebaliknya.

#### **4.6 Uji Statistik**

Pengujian hipotesis menggunakan statistik uji t dan uji F. Masing-masing pengujian tersebut sebagai berikut.

##### **4.6.1 Uji t Parsial**

Uji-t adalah pengujian variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji parsial dilakukan

dengan melihat nilai probabilitas dan nilai hitung t. Berikut pengujian hipotesis uji parsial:

$H_0: \beta_i = 0, i=0,1,2,3$  (variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap model regresi)

$H_1: \beta_i \neq 0$ , (variabel independen berpengaruh signifikan terhadap model regresi).

Dari hasil pengolahan ARDL diperoleh nilai masing-masing variabel p-value sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Uji Parsial**

Variabel	Prob.	Nilai Kritis $\alpha=10\%$	Keputusan
KEMISKINAN(-3)	0.0974	0,1	Signifikan
DANA_OT SUS(-3)	0.0150	0,1	Signifikan
IPM	0.2367	0,1	Tidak Signifikan
ZAKAT(-11)	0.0000	0,1	Signifikan

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial berdasarkan hasil output eviews, maka diperoleh kesimpulan:

- Variabel kemiskinan pada lag ke-3 secara statistik signifikan dan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Aceh saat ini.
- Variabel dana otsus pada lag ke-3 secara statistik signifikan dan berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh.
- Variabel IPM pada lag pertama secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.
- Variabel zakat pada lag ke-11 secara statistik signifikan dan berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh.

- Variabel Dana otsus memiliki p-value  $0,0150 < \alpha 0,1$ , maka secara parsial dana otsus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.
- Variabel zakat memiliki p-value  $0,0000 < \alpha 0,1$ , maka secara parsial zakat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.
- Variabel IPM memiliki p-value  $0,2367 > 0,1$ , maka secara parsial IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

#### 4.6.2 Uji F Simultan

Pengujian koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan statistik uji F, dan uji F adalah pengujian yang dapat melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama. Berikut hasil uji dari uji F:

**Tabel 4.6 Uji simultan**

p-value	Nilai Kritis $\alpha = 10\%$	Keputusan
0.000000	0,1	signifikan

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diperoleh nilai F-statistik sebesar 0,000 yang memiliki nilai probability lebih kecil dari 10% sehingga semua variabel independen secara simultan diasumsikan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan taraf kepercayaan 90%.

#### 4.6.3 Uji $R^2$ (Uji Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan bagaimana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang rendah berarti variabel independen memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen, sedangkan koefisien determinasi yang mendekati 1 berarti variabel independen menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi, maka hasil  $R^2$  adalah 0,8788 yang berarti bahwa variabel dana otsus, IPM, dan zakat mempengaruhi kemiskinan sebesar 87,8% sedangkan sisanya 12,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

#### 4.7 Uji Autokorelasi

Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.7

**Tabel 4.7 Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.962612	Prob. F(12,71)	0.4920
Obs*R-squared	14.55264	Prob. Chi-Square(12)	0.2668

Sumber: Data diolah (2021)

Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai Prob.F lebih besar dari  $\alpha$  (0,1), model terbebas dari autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian uji autokorelasi pada table 4.8 menunjukkan nilai Prob.F sebesar 0,49 lebih besar dari  $\alpha$  (0,1) sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARDL tidak memiliki autokorelasi.

#### **4.8 Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh analisis dana otonomi khusus, indeks pembangunan manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.

##### **4.8.1 Pengaruh Penerimaan zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau sebuah lembaga yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selain individu zakat juga diwajibkan untuk badan/lembaga/institusi. Zakat adalah sistem penting ideologi Islam oleh karena itu ia berperan aktif dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat muslim. Menerapkan zakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan dan aktifitas ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Penyaluran zakat yang telah diatur dalam Al-Quran membuat pendistribusian zakat tepat sasaran sehingga orang-orang yang menerima zakat merupakan orang yang membutuhkan. Semakin



besar penerimaan zakat maka akan semakin zakat yang disalurkan kepada mustahik sehingga akan membantu perekonomian masyarakat dan dapat menurunkan jumlah kemiskinan.

Variabel zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam jangka panjang, artinya jika zakat meningkat sebesar 1 persen maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan menurun sebesar  $2.04E-9$  dan sebaliknya jika zakat menurun maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan sebesar  $2.04E-9$ . Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suriani et al., (2020) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang zakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jika potensi zakat dapat terdistribusi secara optimal, maka zakat merupakan solusi terbaik untuk mengurangi kemiskinan.

#### **4.8.2 Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran atas pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Pengembangan sumber daya manusia digunakan untuk mengembangkan masyarakat agar dapat mengembangkan kapasitasnya sendiri. Pembangunan manusia harus ikut serta dalam merangsang proses-proses yang mampu



meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dengan meningkatkan perekonomian guna mengurangi kemiskinan.

Pada penelitian yang dilakukan terhadap jumlah kemiskinan ditemukan hasil bahwa indeks pembangunan manusia mempunyai hubungan negative dan tidak signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk variabel indeks pembangunan manusia  $-0.383708$  dan nilai probabilitas indeks  $0.2367$ , artinya jika indeks pembangunan menurun ataupun meningkat sebesar 1 persen maka tidak mempengaruhi jumlah kemiskinan di Provinsi Aceh.

#### **4.8.3 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Adanya dana otonomi khusus bagi daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh seharusnya berdampak pada kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Dana otonomi khusus merupakan transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk dana desentralisasi. Dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dinyatakan bahwa dana otonomi khusus merupakan salah satu sumber pendapatan Aceh, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan untuk pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan. Semakin baik infrastruktur maka semakin lancar kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penggunaan dana otonomi khusus oleh pemerintah Aceh tidak hanya diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, tetapi juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan variabel dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam jangka panjang, artinya jika dana otonomi khusus menurun sebesar 1 persen jumlah kemiskinan di Provinsi Aceh akan meningkat sebesar  $-1.43E-10$  dan sebaliknya jika dana otonomi khusus meningkat maka akan dapat menurunkan kemiskinan sebesar  $1.43E-10$ . Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiratna & Qibthiyah, (2020) Angka kemiskinan signifikan turut dipengaruhi oleh penerimaan dana otsus. peningkatan Dana Otsus sebesar 1% dapat menurunkan angka kemiskinan.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) yang telah dilakukan mengenai analisis pengaruh Dana Otonomi Khusus, Zakat, dan IPM terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode Tahun 2014-2018 dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan zakat dalam analisis menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL), dalam jangka panjang zakat memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh pada lag ke-11.
2. Dana Otonomi Khusus dalam analisis menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL), dalam jangka panjang dana otonomi khusus memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh lag ke-3.
3. IPM dalam analisis menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL), dalam jangka panjang variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun pertama.

4. Penerimaan zakat, Dana Otonomi Khusus dan IPM secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Kontribusi seluruh variabel bebas Zakat, Dana Otonomi Khusus, dan IPM mengakibatkan adanya pengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah disimpulkan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh agar memberikan perhatian lebih pada kabupaten/kota yang tergolong dalam jumlah kemiskinan tertinggi. Pemerintah Provinsi Aceh memiliki peran yang penting dalam membuat program-program yang pro terhadap pemberdayaan SDM yang ada, untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
2. Baitul Mal Aceh untuk dapat meningkatkan kualitas pendistribusian zakat, Serta mengoptimalkan pengelolaannya sehingga peran zakat dalam mengatasi kemiskinan dapat lebih besar dan terus meningkat di masa yang akan datang.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil variabel yang lebih banyak dan menambah periode waktu untuk menggambarkan tingkat kemiskinan yang ada di 23 kabupaten kota Provinsi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Khatib Nadhari. (2013). Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 54–72.
- Abdullah, M., & Suhaib, A. (2011). The impact of Zakat on social life of Muslim society. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 8, 85-91.
- Adawiyah, R. (2018). Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten (Studi Perjalanan dan Kiprahnya dalam Pembangunan Ekonomi Umat). *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 95–105.
- Afifudin, T., & Sari, N. (2019). Pengaruh Zakat dan Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1),34-51
- Alfiady, T., & Dewi, R. (2019). Otonomi Khusus dan Kemiskinan di Aceh Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Jurnalisme*,9(1), 38–60.
- Alhudhori, M. (2017). Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.12>
- Amri, K. (2020). Pengaruh Zakat dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Al-Muzara'Ah*, 7(2), 57–70. <https://doi.org/10.29244/jam>.
- Aryani, D. S., Rachmawati, Y., & Seto, A. A. (2019). Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan di Kota Palembang. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.522>.

- Asnidar. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. 2(1), 1–12.
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan. (2016). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*.
- Budiratna, H., & Qibthiyah, R. M. (2020). Evaluasi atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 402-414.
- Dimiyati, D. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189-204. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>.
- Harya, G. I. (2020). Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribisnis*, 20(2), 48–66.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Penertbit Idea Press.
- Hastuti, R. T., Redi, A. (2018). Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1).
- Ismayana. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Kajian Terhadap Mekanisme Dan Kinerja Badan / Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Cirebon). *JURNAL LOGIKA*, Vol XVIII(3), 82–100.

- Jacobus, E. H., Kindangen, P., Walewangko, E. N., Ekonomi, F., Ilmu, M., & Ratulangi, U. S. (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1-16.
- Kumar.M.D.,Saleth.R.M.,Foster.J.D.,Nirajan.V.,Sivamohan,M.V. K. (2016) Water, Human Development, Inclusive Growth, and Poverty Alleviation: Internasional Perspectives,19-47.
- Lapopo, J. (2017). Pengaruh ZIS( Zakat, Infak, dan Sedekah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Periode 1998 - 2010. *Media Ekonomi*, 20(1), 83-108. <https://doi.org/10.25105/me.v20i1.779>.
- Mantsani, M., Rumodar, D. A. L., Syukriah, K., & Soegiarto, S. (2020). Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 466–477. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.17>
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 231-244. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat kemiskinan. *Akutansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 25-38.
- Musa, A. (2016). Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 403–415.
- Najmi, I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana ZIS Terhadap Kemiskinan : Bukti Empiris Data Panel di Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 3(1), 2019, 3(1), 25–33.



- Niswati, K. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah istimewa yogyakarta tahun 2003-2011. *EKO-REGIONAL*, 9(2), 82-89.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217.
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>.
- Priyono, S. (2017). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2017) Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(1), 108-127.
- Riwayati, S., Nurul, D., & Hidayah, B. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77-91..
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41-51.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2008). Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26, 9(1), 18-26. Uny.ac.id
- Suriani, Nurdin, R., & Muhammad. (2020). Causality Relationship of Zakat, Income Inequality, and Poverty: A Panel Co-Integration Approach. *International Journal of Economics*



*and Business Administration*, VIII(4), 875–887.  
<https://doi.org/10.35808/ijeba/637>.

Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Ilmu Ekonomi*.

Taurina, M., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 32–47. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13821>.

Wahid, H., Ahmad, S., Kader, R. A. (2009) Pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia: mengapa masyarakat Islam tidak berpuas hati? . *Jurnal Syariah*, 17(1), 89-112.

Zahra, A., Fatin A, A., Afuwu, H., & Auliyah R, R. (2019). Struktur Kemiskinan Indonesia: Berapa Besar Pengaruh Kesehatan, Pendidikan dan Kelayakan Hunian? *Jurnal Inovasi Ekonomi*. 4(2), <https://doi.org/10.22219/jiko.v4i2.9856>

## Lampiran 1

### JUMLAH PENDUDUK MISKIN KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH (2014-2018)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
SIMEULUE	17,5	18,12	17,93	18,4	18,22	18,034
ACEH SINGKIL	20	24,84	25,09	26,27	25,74	24,388
ACEH SELATAN	28,4	29,61	30,68	32,51	32,82	30,804
ACEH TENGGARA	27,1	30,14	29,39	30,84	30,2	29,534
ACEH TIMUR	63	63,48	61,63	63,67	61,64	62,684
ACEH TENGAH	32,8	34,26	33,16	34,24	32,31	33,354
ACEH BARAT	43,9	41,36	40,11	40,72	39,56	41,13
ACEH BESAR	62,4	62,27	62,03	62,72	60,08	61,9
PIDIE	83,7	88,22	90,16	92,35	89,53	88,792
BIREUEN	72,2	73,14	70,44	71,54	65,74	70,612
ACEH UTARA	112,7	111,44	115,05	118,74	111,27	113,84
ACEH BARAT DAYA	25	25,93	25,73	26,57	25,23	25,692
GAYO LUES	18,6	19,32	19,48	19,91	19,09	19,28
ACEH TAMIANG	39,9	40,38	40,88	42,01	41,21	40,876
NAGAN RAYA	31,9	31,32	30,31	31,06	31,06	31,13
ACEH JAYA	14,2	13,85	13,1	13,23	12,85	13,446
BENER MERIAH	30,2	29,31	29,82	29,99	29,08	29,68
PIDIE JAYA	31,9	31,81	31,94	33,6	31,72	32,194
BANDA ACEH	19,4	19,3	18,8	19,23	19,13	19,172
SABANG	5,6	5,86	5,81	5,98	5,62	5,774
LANGSA	19,8	19,22	18,63	19,2	18,73	19,116
LHOKSEUMAWE	22,5	23,15	23,28	24,4	23,88	23,442
SUBULUSSALAM	14,6	15,25	14,99	15,44	14,78	15,012
ACEH	837,30	851,59	848,44	872,61	839,49	36,95

## Lampiran 2

### PERSENTASE IPM KAB/KOTA DI PROV. ACEH (2014-2018)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
SIMEULUE	62,18	63,16	63,82	64,41	64,74	63,662
ACEH SINGKIL	65,27	66,05	66,96	67,37	68,02	66,734
ACEH SELATAN	62,35	63,28	64,13	65,03	65,92	64,142
ACEH TENGGARA	65,9	66,77	67,48	68,09	68,67	67,382
ACEH TIMUR	63,57	64,55	65,42	66,32	66,82	65,336
ACEH TENGAH	70,96	71,51	72,04	72,19	72,64	71,868
ACEH BARAT	67,31	68,41	69,26	70,2	70,47	69,13
ACEH BESAR	71,06	71,7	71,75	72	72,73	71,848
PIDIE	67,87	68,68	69,06	69,52	69,93	69,012
BIREUEN	68,71	69,77	70,21	71,11	71,37	70,234
ACEH UTARA	65,93	66,85	67,19	67,67	68,36	67,2
ACEH BARAT DAYA	63,08	63,77	64,57	65,09	65,67	64,436
GAYO LUES	63,34	63,67	64,26	65,01	65,88	64,432
ACEH TAMIANG	66,09	67,03	67,41	67,99	68,45	67,394
NAGAN RAYA	65,58	66,73	67,32	67,78	68,15	67,112
ACEH JAYA	67,3	67,53	67,7	68,07	68,83	67,886
BENER MERIAH	70	70,62	71,42	71,89	72,14	71,214
PIDIE JAYA	69,89	70,49	71,13	71,73	71,12	70,872
BANDA ACEH	82,22	83,25	83,73	83,95	84,37	83,504
SABANG	71,5	72,51	73,36	74,1	74,82	73,258
LANGSA	73,81	74,74	75,41	75,89	76,34	75,238
LHOKSEUMAWE	74,44	75,11	75,78	76,34	76,62	75,658
SUBULUSSALAM	60,39	61,32	62,18	62,88	63,48	62,05
ACEH	68,81	69,45	70,00	70,60	71,19	69,113

### Lampiran 3

#### DANA OTSUS KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH MENURUT PERGUB (2014-2018)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	rata-rata
SIMEULUE	105326444 150	10849003 3837	10647792 7991	129993185 554	108627440 992	111783006 505
ACEH SINGKIL	113747315 554	11633784 5137	11637595 4770	118138819 332	110202509 182	114960488 795
ACEH SELATAN	158151037 413	15673164 7778	15499477 7928	176920357 212	135950816 958	156549727 458
ACEH TENGGARA	162405107 409	19482996 9574	16380056 2878	175095446 154	176898377 582	174605892 719
ACEH TIMUR	204540812 409	20330444 8098	20429978 3417	252512203 750	190863331 706	211104115 876
ACEH TENGAH	151548782 608	15302924 2798	15558042 5460	166831320 459	125488700 066	150495694 278
ACEH BARAT	126032648 587	12544778 3438	12002734 5386	145172828 135	120934901 304	127523101 370
ACEH BESAR	148676787 678	14791449 0241	14549068 8294	165687091 725	127872986 102	147128408 808
PIDIE	160629520 329	15482504 6044	15272436 0707	174184090 318	139948593 645	156462322 209
BIREUEN	132235242 030	12665917 8409	12620341 4910	144746630 857	119274158 548	129823724 951
ACEH UTARA	136328668 055	13238492 8052	12952465 3383	178692371 265	130523243 754	141490772 902
ACEH BARAT DAYA	111022420 534	11143909 8930	11168180 5860	126398383 430	108009555 427	113710252 836
GAYO LUES	195021178 231	20085536 7107	19808721 8142	212139540 027	162056797 794	193632020 260
ACEH TAMANG	133953744 076	12682964 0443	13312367 1881	149383161 807	119614281 198	132580899 881
NAGAN RAYA	145833596 496	14584527 4531	14010096 0736	183468756 928	163927648 337	155835247 406

ACEH JAYA	152474420 522	15842591 5563	15555722 2303	163831996 389	129907836 447	152039478 245
BENER MERIAH	109243670 794	11191631 0575	11103140 2802	127365365 951	108724375 091	113656225 043
PIDIE JAYA	942161527 66	96640402 805	94651839 282	982637179 18	942434129 07	956031051 36
BANDA ACEH	112551355 724	11711029 5941	11758458 5309	128838661 682	807590258 95	111368784 910
SABANG	602139857 70	62331350 724	61348336 627	747368944 10	781187985 74	673498732 21
LANGSA	816662863 61	81926615 347	80680341 059	921682915 65	872812756 81	847445620 03
LHOKSEUMA WE	737329800 17	73902055 739	73736159 755	879414766 79	866051662 40	791835676 86
SUBULUSSAL AM	104797081 782	10416427 5991	10571398 5920	116403563 705	106940632 531	904595667 81
ACEH	324843654 3702	40464157 53916	40989594 75200	431830278 6748	421789179 8940	130960471 273

## Lampiran 4

### PENERIMAAN ZAKAT KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH (2014-2018)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
SIMEULUE	2000000 000	1865050 000	2000000 000	150000000 0	150000000 0	169347116 52
ACEH SINGKIL	9363587 25	1210000 000	3000000 000	437000000 0	574173825 9	162800292 65
ACEH SELATAN	2689957 259	3704670 149	6586486 544	378062404 8	595448698 5	158852444 18
ACEH TENGGARA	4347873 000	4959587 000	5709370 000	428704000 0	779700000 0	120240225 35
ACEH TIMUR	2683198 601	3392519 335	3694780 435	347405435 1	447643923 9	103415706 88
ACEH TENGAH	1321230 0069	1768382 7620	1672596 6639	159662841 91	178117678 08	827378235 6
ACEH BARAT	8700264 766	9508143 074	1060385 5226	108851176 00	120104727 72	600197635 2
ACEH BESAR	1974013 8000	1409950 9051	1762926 5409	153415852 80	178630605 19	587455073 0
PIDIE	6012561 83	6538349 82	3232346 37	320917637	108688447 0	542017400 0
BIREUEN	1999715 000	3069661 000	4065967 000	355620571 3	784330379 2	458362431 1
ACEH UTARA	8782785 785	1293643 9812	1158279 2381	128519392 11	139661554 85	454324499 7
ACEH BARAT DAYA	1335392 092	2448346 737	2220750 000	229265390 5	278858811 5	410697050 1
GAYO LUES	9449728 00	1651229 731	1632797 967	154778703 8	211827966 8	354419839 2
ACEH TAMIANG	1440396 270	5550945 837	7461714 918	858433694 6	697248778 7	305161939 7
NAGAN RAYA	3434350 000	3439350 000	4626213 647	554190000 0	587630790 8	288577447 0

ACEH JAYA	1211900 000	1761542 801	3022625 532	333425043 2	370015674 4	260609510 2
BENER MERIAH	6932944 653	9212262 694	8218987 138	845269449 5	855202279 9	259895162 6
PIDIE JAYA	1605162 828	2142509 282	2580800 000	235656940 5	239514900 5	230562781 6
BANDA ACEH	1366963 5340	1667065 2249	1867467 4379	135483545 92	168629055 30	221714617 0
SABANG	2502445 001	2629875 916	3245068 510	302574146 1	302574146 1	221603810 4
LANGSA	2082469 922	2280140 157	2500000 000	226552900 0	240000000 0	177301000 0
LHOKSEUMA WE	3600000 000	6567773 930	7514874 916	606670602 6	562339877 6	157901344 1
SUBULUSSA LAM	1236523 755	2974906 443	3446164 274	285991482 1	247724883 6	597225581, 8
ACEH	2517600 3088	2731249 8282	2797083 6358	521805803 03	540141873 58	589759138 7



## Lampiran 5

### Uji Stasioner (Unit Root Test)

Null Hypothesis: D(KEMISKINAN) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 4 (Automatic - based on AIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.903762	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.491345	
5% level	-2.888157	
10% level	-2.581041	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(KEMISKINAN,2)

Method: Least Squares

Date: 08/10/21 Time: 14:56

Sample (adjusted): 7 115

Included observations: 109 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(KEMISKINAN(-1))	-1.412536	0.204604	-6.903762	0.0000
D(KEMISKINAN(-1),2)	0.418867	0.182010	2.301342	0.0234
D(KEMISKINAN(-2),2)	0.408612	0.157017	2.602346	0.0106
D(KEMISKINAN(-3),2)	0.388699	0.128387	3.027551	0.0031
D(KEMISKINAN(-4),2)	0.378841	0.091483	4.141087	0.0001
C	-0.026683	1.075917	-0.024800	0.9803
R-squared	0.566404	Mean dependent var		-0.022385
Adjusted R-squared	0.545356	S.D. dependent var		16.65888
S.E. of regression	11.23264	Akaike info criterion		7.728997
Sum squared resid	12995.73	Schwarz criterion		7.877145
Log likelihood	-415.2303	Hannan-Quinn criter.		7.789076
F-statistic	26.90965	Durbin-Watson stat		1.956213
Prob(F-statistic)	0.000000			

Null Hypothesis: D(DANA\_OT SUS) has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 7 (Automatic - based on AIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.404292	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.493129	
5% level	-2.888932	
10% level	-2.581453	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
 Dependent Variable: D(DANA\_OT SUS,2)  
 Method: Least Squares  
 Date: 08/10/21 Time: 14:57  
 Sample (adjusted): 10 115  
 Included observations: 106 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(DANA_OT SUS(-1))	-2.020155	0.373806	-5.404292	0.0000
D(DANA_OT SUS(-1),2)	1.117558	0.345803	3.231773	0.0017
D(DANA_OT SUS(-2),2)	0.712717	0.301772	2.361771	0.0202
D(DANA_OT SUS(-3),2)	0.902209	0.271438	3.323811	0.0013
D(DANA_OT SUS(-4),2)	0.402458	0.227363	1.770110	0.0799
D(DANA_OT SUS(-5),2)	0.607811	0.194858	3.119253	0.0024
D(DANA_OT SUS(-6),2)	0.096309	0.145523	0.661813	0.5097
D(DANA_OT SUS(-7),2)	0.342616	0.105203	3.256725	0.0016
C	-9.82E+08	1.87E+09	-0.526199	0.6000
R-squared	0.751518	Mean dependent var		-9.15E+08
Adjusted R-squared	0.731025	S.D. dependent var		3.70E+10
S.E. of regression	1.92E+10	Akaike info criterion		50.27530
Sum squared resid	3.58E+22	Schwarz criterion		50.50144
Log likelihood	-2655.591	Hannan-Quinn criter.		50.36695
F-statistic	36.67137	Durbin-Watson stat		1.805361
Prob(F-statistic)	0.000000			

Null Hypothesis: IPM has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.124021	0.0275
Test critical values:		
1% level	-3.488585	
5% level	-2.886959	
10% level	-2.580402	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
 Dependent Variable: D(IPM)  
 Method: Least Squares  
 Date: 08/10/21 Time: 14:57  
 Sample (adjusted): 2 115  
 Included observations: 114 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM(-1)	-0.157099	0.050287	-3.124021	0.0023
C	10.87676	3.486348	3.119814	0.0023
R-squared	0.080154	Mean dependent var		0.011404
Adjusted R-squared	0.071941	S.D. dependent var		2.671939
S.E. of regression	2.574035	Akaike info criterion		4.746214
Sum squared resid	742.0733	Schwarz criterion		4.794218
Log likelihood	-268.5342	Hannan-Quinn criter.		4.765696
F-statistic	9.759507	Durbin-Watson stat		1.995223
Prob(F-statistic)	0.002271			

Null Hypothesis: ZAKAT has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 5 (Automatic - based on AIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.356294	0.0147
Test critical values:		
1% level	-3.491345	
5% level	-2.888157	
10% level	-2.581041	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(ZAKAT)

Method: Least Squares

Date: 08/10/21 Time: 14:58

Sample (adjusted): 7 115

Included observations: 109 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ZAKAT(-1)	-0.303087	0.090304	-3.356294	0.0011
D(ZAKAT(-1))	0.032024	0.101682	0.314939	0.7535
D(ZAKAT(-2))	0.210381	0.098785	2.129679	0.0356
D(ZAKAT(-3))	0.111125	0.099331	1.118735	0.2659
D(ZAKAT(-4))	0.055770	0.099654	0.559640	0.5770
D(ZAKAT(-5))	-0.224574	0.096688	-2.322679	0.0222
C	1.87E+09	6.34E+08	2.953303	0.0039
R-squared	0.236757	Mean dependent var		14136607
Adjusted R-squared	0.191860	S.D. dependent var		3.66E+09
S.E. of regression	3.29E+09	Akaike info criterion		46.72789
Sum squared resid	1.10E+21	Schwarz criterion		46.90073
Log likelihood	-2539.670	Hannan-Quinn criter.		46.79798
F-statistic	5.273372	Durbin-Watson stat		2.038649
Prob(F-statistic)	0.000091			

## Lampiran 6

### Model ARDL

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: ARDL

Date: 08/10/21 Time: 14:47

Sample (adjusted): 12 115

Included observations: 104 after adjustments

Maximum dependent lags: 12 (Automatic selection)

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Dynamic regressors (12 lags, automatic): DANA\_OT SUS IPM ZAKAT

Fixed regressors: C

Number of models evaluated: 26364

Selected Model: ARDL(3, 3, 0, 11)

Note: final equation sample is larger than selection sample

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
KEMISKINAN(-1)	0.921531	0.092249	9.989596	0.0000
KEMISKINAN(-2)	0.057555	0.128002	0.449640	0.6541
KEMISKINAN(-3)	-0.155327	0.092655	-1.676394	0.0974
DANA_OT SUS	1.45E-10	5.27E-11	2.750893	0.0073
DANA_OT SUS(-1)	4.34E-12	7.62E-11	0.056943	0.9547
DANA_OT SUS(-2)	-2.64E-10	7.92E-11	-3.329312	0.0013
DANA_OT SUS(-3)	1.43E-10	5.76E-11	2.484205	0.0150
IPM	-0.383708	0.321908	-1.191983	0.2367
ZAKAT	9.71E-10	3.74E-10	2.594900	0.0112
ZAKAT(-1)	-4.36E-10	4.52E-10	-0.965411	0.3371
ZAKAT(-2)	-5.32E-10	4.40E-10	-1.207961	0.2305
ZAKAT(-3)	8.61E-10	4.15E-10	2.077040	0.0409
ZAKAT(-4)	-6.52E-10	4.26E-10	-1.529976	0.1298
ZAKAT(-5)	1.70E-11	4.67E-10	0.036453	0.9710
ZAKAT(-6)	6.60E-10	4.76E-10	1.387755	0.1689
ZAKAT(-7)	-4.75E-10	4.37E-10	-1.087375	0.2800
ZAKAT(-8)	7.09E-10	4.15E-10	1.710841	0.0908
ZAKAT(-9)	-3.64E-10	4.40E-10	-0.827078	0.4106
ZAKAT(-10)	-1.50E-09	4.53E-10	-3.307508	0.0014
ZAKAT(-11)	2.04E-09	3.52E-10	5.775970	0.0000
C	21.70283	24.39620	0.889599	0.3763
R-squared	0.878830	Mean dependent var		38.54731
Adjusted R-squared	0.849633	S.D. dependent var		26.52514
S.E. of regression	10.28572	Akaike info criterion		7.677685
Sum squared resid	8781.063	Schwarz criterion		8.211649
Log likelihood	-378.2396	Hannan-Quinn criter.		7.894009

F-statistic	30.09946	Durbin-Watson stat	2.088094
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

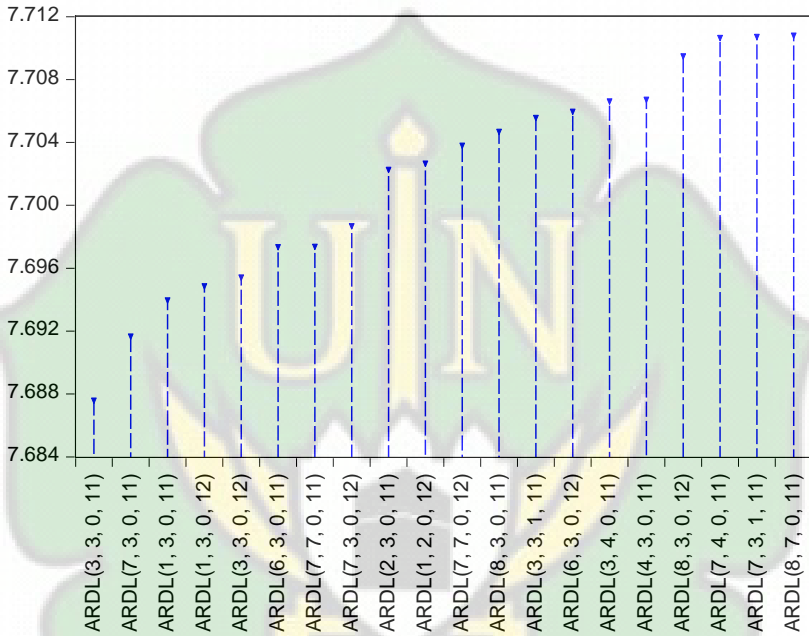
\*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.



## Lampiran 7

### UJi Lag Optimal

Akaike Information Criteria (top 20 models)





## Lampiran 8

### Uji Cointegrasi

ARDL Long Run Form and Bounds Test  
 Dependent Variable: D(KEMISKINAN)  
 Selected Model: ARDL(3, 3, 0, 11)  
 Case 3: Unrestricted Constant and No Trend  
 Date: 08/10/21 Time: 14:49  
 Sample: 1 115  
 Included observations: 104

Conditional Error Correction Regression				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.70283	24.39620	0.889599	0.3763
KEMISKINAN(-1)*	-0.176241	0.046898	-3.757986	0.0003
DANA_OT SUS(-1)	2.88E-11	3.78E-11	0.761256	0.4487
IPM**	-0.383708	0.321908	-1.191983	0.2367
ZAKAT(-1)	1.30E-09	4.59E-10	2.828199	0.0059
D(KEMISKINAN(-1))	0.097772	0.092398	1.058158	0.2931
D(KEMISKINAN(-2))	0.155327	0.092655	1.676394	0.0974
D(DANA_OT SUS)	1.45E-10	5.27E-11	2.750893	0.0073
D(DANA_OT SUS(-1))	1.21E-10	5.91E-11	2.040815	0.0444
D(DANA_OT SUS(-2))	-1.43E-10	5.76E-11	-2.484205	0.0150
D(ZAKAT)	9.71E-10	3.74E-10	2.594900	0.0112
D(ZAKAT(-1))	-7.63E-10	4.45E-10	-1.714342	0.0902
D(ZAKAT(-2))	-1.29E-09	4.33E-10	-2.990681	0.0037
D(ZAKAT(-3))	-4.34E-10	4.14E-10	-1.046461	0.2984
D(ZAKAT(-4))	-1.09E-09	4.17E-10	-2.602377	0.0110
D(ZAKAT(-5))	-1.07E-09	4.25E-10	-2.516949	0.0138
D(ZAKAT(-6))	-4.09E-10	3.69E-10	-1.108964	0.2706
D(ZAKAT(-7))	-8.84E-10	3.61E-10	-2.445639	0.0166
D(ZAKAT(-8))	-1.74E-10	3.54E-10	-0.491787	0.6242
D(ZAKAT(-9))	-5.38E-10	3.63E-10	-1.483451	0.1417
D(ZAKAT(-10))	-2.04E-09	3.52E-10	-5.775970	0.0000

\* p-value incompatible with t-Bounds distribution.

\*\* Variable interpreted as  $Z = Z(-1) + D(Z)$ .

Levels Equation				
Case 3: Unrestricted Constant and No Trend				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.

DANA_OT SUS	1.63E-10	2.10E-10	0.777256	0.4392
IPM	-2.177179	1.794000	-1.213589	0.2283
ZAKAT	7.36E-09	2.63E-09	2.801078	0.0063

EC = KEMISKINAN - (0.0000\*DANA\_OT SUS - 2.1772\*IPM + 0.0000\*ZAKAT )

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
			Asymptotic: n=1000	
F-statistic	4.210146	10%	2.72	3.77
K	3	5%	3.23	4.35
		2.5%	3.69	4.89
		1%	4.29	5.61
			Finite Sample: n=80	
Actual Sample Size	104			
		10%	2.823	3.885
		5%	3.363	4.515
		1%	4.568	5.96

t-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
t-statistic	-3.757986	10%	-2.57	-3.46
		5%	-2.86	-3.78
		2.5%	-3.13	-4.05
		1%	-3.43	-4.37

## Lampiran 9

### Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.962612	Prob. F(12,71)	0.4920
Obs*R-squared	14.55264	Prob. Chi-Square(12)	0.2668

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: ARDL

Date: 08/10/21 Time: 14:54

Sample: 12 115

Included observations: 104

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KEMISKINAN(-1)	0.137512	0.178613	0.769886	0.4439
KEMISKINAN(-2)	0.101492	0.244758	0.414663	0.6796
KEMISKINAN(-3)	-0.101003	0.182922	-0.552162	0.5826
DANA_OT SUS	2.44E-11	5.48E-11	0.445889	0.6570
DANA_OT SUS(-1)	-2.02E-11	8.18E-11	-0.246623	0.8059
DANA_OT SUS(-2)	-1.63E-11	8.62E-11	-0.189081	0.8506
DANA_OT SUS(-3)	-1.04E-11	6.38E-11	-0.163045	0.8709
IPM	0.124269	0.361170	0.344073	0.7318
ZAKAT	-9.40E-11	3.90E-10	-0.241135	0.8101
ZAKAT(-1)	-1.75E-10	4.66E-10	-0.375767	0.7082
ZAKAT(-2)	-1.95E-11	4.62E-10	-0.042282	0.9664
ZAKAT(-3)	9.50E-11	4.40E-10	0.216070	0.8296
ZAKAT(-4)	-8.84E-11	4.37E-10	-0.202204	0.8403
ZAKAT(-5)	9.29E-11	4.82E-10	0.192828	0.8476
ZAKAT(-6)	-1.00E-10	4.99E-10	-0.201194	0.8411
ZAKAT(-7)	-5.35E-11	4.59E-10	-0.116489	0.9076
ZAKAT(-8)	8.31E-11	4.29E-10	0.193650	0.8470
ZAKAT(-9)	-1.41E-10	4.52E-10	-0.312008	0.7559
ZAKAT(-10)	-2.88E-11	4.74E-10	-0.060809	0.9517
ZAKAT(-11)	-3.43E-11	3.70E-10	-0.092777	0.9263
C	-8.082049	27.11671	-0.298047	0.7665
RESID(-1)	-0.255422	0.214171	-1.192608	0.2370
RESID(-2)	-0.379829	0.209661	-1.811628	0.0743
RESID(-3)	-0.267307	0.160548	-1.664972	0.1003
RESID(-4)	-0.179097	0.159865	-1.120300	0.2664
RESID(-5)	-0.191195	0.163415	-1.170000	0.2459

RESID(-6)	0.083866	0.154108	0.544207	0.5880
RESID(-7)	-0.072207	0.143330	-0.503783	0.6160
RESID(-8)	-0.025425	0.132643	-0.191681	0.8485
RESID(-9)	-0.008427	0.126089	-0.066838	0.9469
RESID(-10)	-0.160820	0.126673	-1.269571	0.2084
RESID(-11)	-0.095235	0.127052	-0.749577	0.4560
RESID(-12)	-0.052141	0.127771	-0.408084	0.6844
<hr/>				
R-squared	0.139929	Mean dependent var	6.83E-15	
Adjusted R-squared	-0.247708	S.D. dependent var	9.233257	
S.E. of regression	10.31363	Akaike info criterion	7.757714	
Sum squared resid	7552.336	Schwarz criterion	8.596799	
Log likelihood	-370.4011	Hannan-Quinn criter.	8.097652	
F-statistic	0.360980	Durbin-Watson stat	2.015145	
Prob(F-statistic)	0.998960			

